

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PONDOK PESANTREN

**Dr. Rita Kusumadewi, SE, MM.
Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
Wartoyo, MSI.**

**Penerbit :
CV ELSI PRO**

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PONDOK PESANTREN

Dr. Rita Kusumadewi, SE, MM.

Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.

Wartoyo, MSI.

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Diana Djuwita, MM.

Desain cover & layout : Khayatun Nufus

Percetakan : CV. ELSI PRO

Cetakan Pertama : Februari 2019

133 Halaman

ISBN 978-602-1091-89-0

Hak Cipta dilindungi Undang- Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga laporan hasil penelitian dalam bentuk bukuyang berjudul: "***Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren***" dapat hadir dihadapan para pembaca sekalian. Mengutip dari pribahasa zaman dahulu "*tak kenal maka tak sayang*" begitulah motivasi bagi kami untuk dapat menghadirkan sebuah bacaan yang mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang ingin lebih mengenal dan mendalami literasi keuangan syariah. Literasi keuangan sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Annamaria Lusardi merupakan sebuah fase paling awal bagi setiap orang untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan pribadinya secara lebih efektif, efisien dan maksimal. Sebab sebagian besar masalah keuangan yang dialami oleh seseorang bukanlah berasal dari aspek pendapatan, melainkan pembelanjaan atau pengeluaran. Dengan memahami dan mengimplementasikan pengetahuan keuangan, maka seseorang diharapkan akan bisa menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya dalam aspek keuangan, sehingga dapat mempersiapkan masa depan keuangannya secara lebih baik dan positif.

Isu yang diangkat dalam buku ini adalah mengenai tingkat literasi keuangan syariah di kalangan umat islam sendiri, khususnya di kalangan pondok pesantren. Menarik sekaligus menjadi sebuah keprihatinan bagi kami para penggiat ekonomi syariah, yang mana hingga lebih dari 25 tahun sejak berdirinya Bank Syariah pertama di Tanah Air gaung ekonomi syariah dan juga perkembangan ekonomi syariah khususnya keuangan syariah masih belum signifikan. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah hanya berada di kisaran 5%, hal ini tentu saja sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan pertumbuhan *market share* di negara-negara lainnya terutama Malaysia yang sudah lebih dari 20%. Salah satu aspek yang menyebabkan lambatnya perkembangan keuangan syariah adalah masalah literasi, atau pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini terbukti dari hasil temuan survey

oleh OJK yang mana literasi keuangan syariah masyarakat indonesia masih sangat rendah (11,6%) di tahun 2016. Atas dasar temuan OJK tersebut kami tergerak untuk lebih mendalami kembali kebenaran atas hasil survey tersebut dengan secara lebih khusus menjadikan umat islam di kalangan pondok pesantren sebagai sasaran penelitian ini.

Dengan selesainya penelitian ini, kami tim peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat, terutama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, terlebih lagi kami sangat berhutang budi kepada para pimpinan Pondok Pesantren yang dengan hangat dan antusias menerima kedatangan tim survey kami untuk melakukan pengambilan data. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Sdr. Dawud, SE yang telah memberikan banyak sekali bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini, juga kepada Ibu Diana Djuwita, MM yang telah memberikan kritik dan masukan, melakukan *editing* dan juga *finishing* dalam proses penerbitan buku hasil penelitian ini. Tentu saja ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kami persembahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pihak penyelenggara dan penyandang dana penelitian ini, untuk semua kebutuhan pendanaan dan administrasi yang diperlukan selama penelitian ini berlangsung. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan mendukung terlaksananya penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga buku publikasi hasil penelitian ini memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi ranah keilmuan ekonomi islam sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan dari penelitian ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Cirebon, Februari 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	v
Urgensitas Literasi Keuangan.....	1
Pendahuluan.....	1
Definisi dan Konsep Literasi Keuangan	7
Definisi Literasi Keuangan	7
Konsep Literasi Keuangan	8
Pengukuran Literasi Keuangan.....	11
Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan	11
1.Pengukuran berdasarkan faktor usia	11
2.Pengukuran berdasarkan Jenis Kelamin	12
3.Pengukuran berdasarkan Faktor Pendidikan	13
4.Pengukuran berdasarkan Faktor-faktor lainnya	13
Klasifikasi Tingkat Literasi Keuangan	15
Peran Pesantren dalam Pendidikan Literasi Keuangan Syariah....	19
Pentingnya Pendidikan Literasi Keuangan	19
Pondok Pesantren di Indonesia	21
Pesantren dan Pengembangan Ekonomi	24
Pesantren Sebagai Pusat pendidikan Ekonomi Syariah	28
Metodologi Penelitian Literasi Keuangan	31
Pendekatan Penelitian	31
Sumber Informasi	33
Sumber dan Jenis Data	34
Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34

Model Penelitian	36
Teknik Analisis Data	37
Pengembangan Hipotesis	41
Profil Pondok Pesantren di Wilayah III Cirebon	45
Pondok Pesantren di Wilayah III Cirebon	45
1. Pondok Pesantren Ulumudin Kota Cirebon	45
2. Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kabupaten Cirebon	45
3. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Kabupaten Cirebon	45
4. Pondok Pesantren As-Sakienah Kabupaten Indramayu	46
5. Pondok Pesantren Al-Ishlah Tajug Kabupaten Indramayu	46
6. Pondok Pesantren Cadang Pinggan Kabupaten Indramayu	46
7. Pondok Pesantren Al-Mutawally Kabupaten Kuningan	47
8. Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan	47
9. Pondok Pesantren Al-Mizan Kabupaten Kuningan	47
Profile Pengelolaan Pondok Pesantren	48
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Gambaran Responden Berdasarkan Usia	48
Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Gambaran Responden Rekening Bank Responden	50
Gambaran Responden Berdasarkan Profesi	50
Gambaran Responden Berdasarkan Pendapatan	51
Gambaran Responden Berdasarkan Pengeluaran	52
Gambaran Responden Berdasarkan Lokasi	52
Jenis Pondok Pesantren	53
Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren	55
Gambaran Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren	55
Persepsi Pengelolaan Pondok Pesantren Tentang Pengelolaan	
Keuangan Pribadi	55
1. Pengelolaan Keuangan Pribadi Dengan Baik Untuk Menghindari	
Mudharat	55
2. Kepastian Produk yang Dibeli Halal dan Bermanfaat	56

3.Perencanaan Pengeluaran Keuangan	56
4.Perilaku Menabung	57
5.Manajemen Keuangan	58

Persepsi Pengelolaan Pondok Pesantren Tentang Konsep Ekonomi

Syariah	60
1.Tujuan Utama Sistem Ekonomi Syariah	60
2.Sistem Keuangan Syariah Berbeda dengan Keuangan Konvensional	61
3.Prinsip-prinsip Dalam Keuangan Syariah	61
4.Penyisihan Pendapatan Untuk Zakat	62
5.Keberkahan Sistem Keuangan Syariah	63

Persepsi Pengelolaan Pondok Pesantren Tentang Perbankan Syariah ...65

1.Produk-produk Simpanan dan Pembiayaan Bank Syariah	65
2.Produk Perbankan Syariah Kompetitif	66
3.Nisbah Bagi Hasil Syariah	67
4.Penggunaan Produk Jasa Simpanan dan Pembiayaan	68
5.Jaminan Kesesuaian Syariah Produk Bank Syariah	69

Persepsi Pengelolaan Pondok Pesantren Tentang Asuransi Syariah72

1.Sistem Asuransi Syariah Menggunakan Prinsip Takaful dan Tabarru	72
2.Pemahaman Tentang Produk, Manfaat dan Resiko Asuransi Syariah	73
3.Premi Asuransi Dikelola Menjadi Investasi dan Dana Tabarru	73
4.Ketepatan Membayar Premi	74
5.Kenyamanan Asuransi Syariah (Halal dan Klaim Mudah)	75

Persepsi Pengelolaan Pondok Pesantren Tentang Pasar Modal Syariah .77

1.Pemahaman Tentang Pasar Modal Syariah	77
2.Pilihan Investasi Saham dan Obligasi Syariah	78
3.Manfaat dan Resiko Investasi di Pasar Modal Syariah	79
4.Pilihan Investasi di Pasar Modal Syariah	80
5.Investasi Syariah Halal dan Menguntungkan	81

Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok 85

Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren	85
--	----

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren Wilayah III Cirebon	87
1.Uji Instrumentasi Penelitian	88
a.Uji Validitas	88
b.Uji Reliabilitas	90
2.Uji Asumsi Klasik	91
a.Uji Normalitas	91
b.Uji Determinasi	92
c.Pengujian Secara Individu (Parsial)	94
d.Pengujian Bersama-sama (Uji F)	98

Implikasi Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pesantren 103

Literasi Keuangan Syariah dan Implikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah	103
Pola Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pesantren	104
a.Pola Literasi Pengelolaan Keuangan Keluarga	104
b.Pola Literasi Ekonomi Syariah	105
c.Pola Literasi Perbankan Syariah	106
d.Pola Literasi Asuransi Syariah	107
e.Pola Literasi Pasar Modal Syariah	108

Kesimpulan dan Saran 111

Kesimpulan	111
Saran	112

Daftar Pustaka 113

Lampiran Dokumentasi 115

URGENSITAS LITERASI KEUANGAN

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, oleh karena itu, tidak mengherankan jika pesantren di Indonesia berjumlah sangat banyak. Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Agama Islam, yang didalamnya terdiri dari banyak unsur seperti Kyai, Ustadz, Ustadzah, staf, dan santri. Lingkungan pesantren memiliki kekhasan tersendiri, dimana warga pesantren menjalani kehidupannya sehari-hari berlandaskan nilai-nilai agama Islam, karena setiap harinya para guru dan santri tersebut mengkaji Agama Islam.

Fungsi utama pesantren adalah sebagai tempat menimba ilmu Agama Islam bagi para santri, biasanya para santri ini tinggal di dalam lingkungan pesantren, sehingga ada banyak aktifitas yang terjadi di dalam pesantren, tidak hanya proses belajar mengajar, melainkan didalamnya terjadi juga aktifitas ekonomi karena pihak pesantren harus memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi warga pesantren.

Seiring berkembangnya fungsi pesantren tersebut, maka dapat dilihat perkembangan pesantren saat ini baik di pesantren tradisional maupun pesantren modern, kini di dalam lingkungan pesantren dapat dijumpai berbagai fasilitas ekonomi seperti kantin, waserda, koperasi, laundry, dan lain-lain. Hal ini tentunya mendorong berkembangnya perekonomian di dalam pesantren, sehingga pimpinan pondok pesantren diharapkan mampu mengelola perekonomian pesantren dengan baik dan tepat serta sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Salah satu bentuk pengelolaan perekonomian pesantren adalah pengelolaan keuangan pesantren yang dilakukan oleh manajemen pondok pesantren. Pengelolaan keuangan pesantren akan sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kemampuan pimpinan

pondok pesantren, juga didukung oleh pemahaman pimpinan pesantren dalam bidang ekonomi Islam.

Ekonomi Islam yang berkembang saat ini sudah menancapkan eksistensinya dalam bentuk lembaga keuangan syariah, salah satunya bank syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada akhir tahun 2016 sebesar 19,67%, sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,12%, tertinggi sepanjang keberadaan bank syariah di Indonesia (<http://www.m.republika.co.id>). Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah adalah karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah. Inilah yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan syariah.

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai keuangan dan cara mengelolanya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell : 2014, 2015). Literasi keuangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan tidak hanya terjadi pada sisi hulu saja (pendapatan) melainkan lebih ke hilir (pengelolaan) keuangan. (Krishna *et all* : 2010). Kesalahan dalam mengelola keuangan sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan (*unliterate*) dan ketidakpedulian dalam mendistribusikan pendapatan, sehingga terjadilah keadaan "*besar pasak daripada tiang*".

Telah banyak studi terkait dengan ekonomi syariah, manajemen bank syariah, produk-produk bank syariah dan penelitian-penelitian lain terkait dengan ekonomi syariah, namun masih sedikit sekali penelitian yang membahas mengenai literasi keuangan syariah. Padahal bagaimana mungkin masyarakat muslim akan memahami dan menggunakan produk-produk bank syariah apabila pengetahuan (literasi) keuangan syariahnya masih rendah.

Berdasarkan survey yang pernah dilakukan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 tentang tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu *well literate* (21,84%), *sufficient literate* (75,69%), *less literate* (2,06%),

dan *not literate* (0,41%). Sedangkan hasil survey terbaru OJK tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 29,7%, demikian juga di aspek inklusi keuangan terjadi kenaikan dari 59,7% di tahun 2013 menjadi 67,8% di tahun 2016. (<http://www.ojk.go.id>). Artinya, baru seperlima dari seluruh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk dan jasanya serta memiliki keyakinan dengan baik.

Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan per Provinsi

No	Provinsi	Indeks Literasi Keuangan		
		Komposit	Konvensional	Syariah
1	DKI Jakarta	40,0%	39,6%	16,4%
2	Jawa Barat	33,0%	33,0%	4,7
3	Jawa Tengah	33,5%	33,5%	11,2%
4	DI Yogyakarta	38,5%	38,5%	9,5
5	Jawa Timur	35,6%	35,3%	29,4%
6	Banten	38,2%	38,2%	7,3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Jawa Barat merupakan yang terendah dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat di provinsi-provinsi yang berada di wilayah pulau Jawa. Terlebih pada aspek literasi keuangan syariah yang hanya 4,7% masyarakat Jawa Barat yang sudah melek keuangan syariah, jauh dibawah Jawa Timur yang mencapai 29,4% atau bahkan Provinsi Banten yang sebesar 7,3%.

Tabel 2. Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016
per Provinsi berdasarkan Strata Wilayah

No	Nama Provinsi	Nama Kota/Kabupaten	Indeks Literasi
1	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	5
		Kepulauan Seribu	2

2	Jawa Barat	Bandung	4
		Cirebon	1
		Tasikmalaya	3
3	Jawa Tengah	Semarang	4
		Solo	3
		Banyumas	2
4	DI Yogyakarta	Yogyakarta	4
		Sleman	3
5	Jawa Timur	Surabaya	4
		Malang	3
		Jember	2
6	Banten	Tangerang	4
		Serang	3

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.

Tabel 2 secara lebih detail menunjukkan sebaran tingkat literasi keuangan per daerah. Dari data tersebut terlihat bahwa daerah paling rendah tingkat literasi keuangannya di Provinsi Jawa Barat adalah daerah Cirebon dengan tingkat literasi keuangan sebesar 18,7%. Jauh di bawah Bandung 49,2% dan Tasikmalaya 30,0%. Hal ini menjadi ironi karena secara geografis wilayah Cirebon adalah wilayah yang lebih urban karena merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya di bagian timur. Selain itu, Cirebon juga merupakan daerah yang banyak memiliki pondok pesantren besar, sehingga dijuluki sebagai Kota Wali. Dengan tingkat literasi keuangan yang begitu rendah yang bisa dikategorikan sebagai *less literate*, menjadikannya menarik untuk dilakukan penelitian lebih jauh.

Dalam literasi dikenal 3 kategori pengelompokan tingkat literasi keuangan yaitu *well literate*, *sufficient literate*, dan *less literate*. Kategori *well literate* berarti masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sedangkan kategori *sufficient literate* berarti masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak

dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Kategori *less literate* artinya masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan terakhir kategori *not literate* yang berarti masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (<http://www.ojk.go.id>).

Survey yang dilakukan oleh OJK, baru mengukur tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia pada umumnya, bukan mengukur tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, apabila pada tingkat literasi keuangan yang umum saja tingkat literasi penduduk Indonesia masih tergolong rendah, maka bagaimanakah tingkat literasi keuangan syariahnya? Hal ini tentu akan menarik, terlebih lagi bila objek penelitian ini difokuskan pada kalangan pondok pesantren yang secara basis keilmuan agamanya sudah mapan dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Literasi keuangan syariah sangat penting bagi kalangan pondok pesantren, selain pesantren merupakan pusat pendidikan ilmu agama Islam yang merupakan dasar dari ilmu ekonomi islam, yang seharusnya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik daripada masyarakat pada umumnya, pondok pesantren juga diharapkan dapat memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak sesuai ajaran agama Islam.

Preferensi pada keuangan syariah yang menjadi perhatian Kunt, Klapper dan Randall (2013) mengklasifikasikan Muslim kedalam tiga kategori sehubungan dengan preferensi terhadap keuangan Islam atau konvensional, yaitu: (i) Muslim yang menolak untuk menggunakan produk keuangan konvensional karena menganggap melanggar Syariat Islam, (ii) Muslim yang menggunakan atau akan menggunakan kredit konvensional tetapi ada kemungkinan beralih ke pembiayaan syariah jika lebih banyak tersedia atau ditawarkan dengan hargayang kompetitif, dan (iii) Muslim yang menggunakan atau akan menggunakan kredit konvensional dan akan terus menggunakannya

sekalipun harganya kompetitif dengan produk Syariah. (Setiawati, 2015)

Terdapat banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah III Cirebon, meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Hal ini tidak mengherankan karena Cirebon dikenal sebagai kota wali. Pesantren-pesantren yang tersebar di wilayah III Cirebon ini banyak yang bercorak tradisional juga ada yang bercorak modern, ada yang besar dan ada yang kecil dilihat dari luasnya lingkungan pesantren dan jumlah santri yang mondok. Pengelolaan pesantren yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda, tergantung pada persepsi dan pemahaman pimpinan pondok pesantren masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan pesantren, seperti sumber keuangan pesantren dan pemanfaatan keuangan pesantren.

Di Indonesia belum ditemukan penelitian yang mengukur tingkat literasi keuangan khususnya di kalangan masyarakat muslim dan juga belum ada studi yang menemukan model pengukuran yang dapat mengaitkan aturan-aturan muamalah tentang sumber dan pemanfaatan dana. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui literasi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren serta mengetahui preferensi dan implikasinya terhadap lembaga keuangan syariah yang ada.

DEFINISI DAN KONSEP LITERASI KEUANGAN

DEFINISI LITERASI KEUANGAN

Literasi keuangan merupakan elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, sebab dengan semakin tinggi tingkat literasi keuangan penduduknya, maka semakin mudah sistem keuangan diimplementasikan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin mudah lembaga-lembaga keuangan memberikan akses keuangan kepada masyarakat.

Definisi literasi keuangan dapat dijelaskan dalam banyak aspek. Menurut Komisi Literasi dan Pendidikan Keuangan A.S. (FLEC), literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan. Adapun strategi untuk mencapainya adalah dengan cara, meningkatkan kesadaran dan akses ke pendidikan keuangan yang efektif, menentukan dan mengintegrasikan kompetensi keuangan inti, meningkatkan infrastruktur pendidikan keuangan, dan melakukan identifikasi, tingkatkan, dan bagikan praktik yang efektif. Sedangkan menurut *The Association of Chartered Certified Accountants* (2014), istilah literasi keuangan meliputi pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. (Liebowitz, 2016).

Huston dan Remund, (2010) menjelaskan bahwa istilah literasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan kapasitas keuangan sering digunakan secara bergantian. Literasi keuangan didefinisikan sebagai terdiri dua elemen kunci: seberapa baik seorang individu dapat memahami informasi keuangan dan seberapa baik seorang individu dapat menggunakan informasi keuangan untuk mengelola keuangan

pribadinya baik dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan perencanaan keuangan jangka panjang (Harrison, 2016).

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan didefinisikan sebagai suatu proses dan aktivitas seseorang untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik untuk kesejahteraan di masa depan (OJK, 2014).

KONSEP LITERASI KEUANGAN

Zokaityte (2017) berkeyakinan bahwa pemahaman yang kurang baik terhadap literasi keuangan akan berdampak buruk pada kemampuan konsumen untuk memahami produk dan layanan keuangan yang dijual kepada mereka. Pemahaman akan inflasi, manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio pada investasi sangat menentukan dalam perkembangan ekonomi seseorang di masa yang akan datang. Sebagai akibat dari lemahnya pemahaman akan literasi keuangan, maka dalam melakukan konsumsi ataupun keputusan-keputusan ekonomis lainnya, orang dengan kemampuan literasi rendah akan lebih mengedepankan insting daripada logika ekonomi yang benar, sehingga hampir sebagian besar keputusan ekonomi yang dibuatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Sedangkan Retzmann dan Seeber (2016) menganggap literasi keuangan sebagai bagian dari konsep literasi ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, mereka mengidentifikasi tiga bidang kompetensi dalam literasi keuangan yaitu: (1) Pengambilan keputusan dan rasionalitas individu, (2) hubungan dan interaksi dengan orang lain dan (3) tatanan dan sistem keseluruhan. Mereka menyebutkan ini bidang yang berkaitan dengan masalah literasi keuangan secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki kompetensi dan terdidik secara finansial.

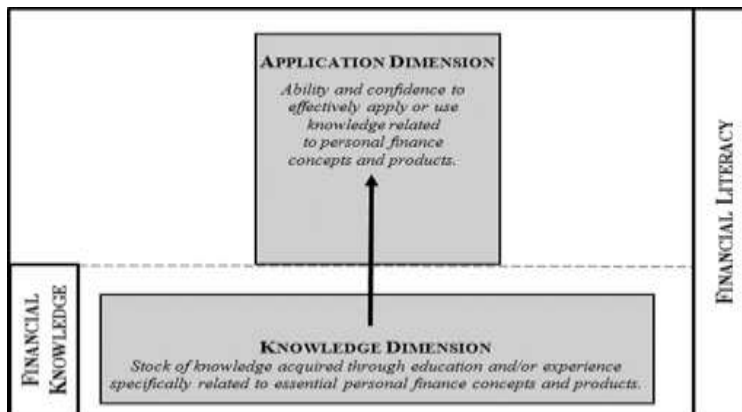
Keduanya kemudian mendefinisikan kompetensi keuangan sebagai kemampuan kognitif seseorang terhadap penilaian, pengambilan keputusan dan kemampuan perencanaan, baik secara praktis dan teknis akan keterampilan seseorang untuk menerapkan

rencana keuangan dan pengambilan keputusan, termasuk penggunaan media elektronik. Dalam hal ini berkaitan dengan pengalokasian uang tunai, serta mengelola pendapatan melalui pembelanjaan pada aset material dan nonmaterial untuk diri mereka sendiri, ataupun sebagai wali untuk orang lain, dan sebagai perwakilan sosial atau politik untuk masyarakat umum, dalam menghasilkan dan melaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab aset tersebut untuk mencapai efek terbaik pada jangka pendek, menengah dan / atau kesejahteraan jangka panjang dari orang-orang yang bersangkutan.

Istilah terdidik secara finansial adalah digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mau dan mampu menilai, memutuskan dan bertindak secara mandiri (pemerintahan sendiri), tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan ini kompetensi dialihkan dalam situasi kehidupan yang berbentuk keuangan (Apra et al : 2016).

Menurut Houston (2010) Literasi keuangan (*financial literacy*) dan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) keduanya merupakan modal bagi setiap orang untuk mengelola keuangannya dengan benar, namun memiliki konstruksi yang berbeda. Pengetahuan finansial merupakan dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh. Sedangkan literasi keuangan memiliki dimensi yang lebih menekankan pada unsur kemampuan dan keyakinan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya dalam membuat keputusan keuangan. Ketika mengembangkan instrumen untuk mengukur literasi keuangan, akan menjadi penting untuk menentukan tidak hanya jika seseorang mengetahui informasi keuangan tetapi juga jika dia dapat menerapkannya dengan tepat.

Gambar 1



Meskipun beberapa definisi tentang literasi keuangan telah diungkapkan oleh beberapa ahli sebelumnya, namun tidak ada definisi yang diterima secara universal. Berdasarkan konsep literasi keuangan yang disajikan dalam kerangka kerja konseptual yang digambarkan pada Gambar 1, literasi keuangan bisa didefinisikan sebagai mengukur seberapa baik seorang individu dapat memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan pribadi. Definisi ini langsung, tidak bertentangan dengan definisi yang ada dalam literatur dan konsisten dengan konstruksi keaksaraan standar lainnya.

Sementara itu Chendan Volpe (1998) memberikan penjelasan secara lebih luas bahwa literasi keuangan dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu:

- General Personal Finance Knowledge*, meliputi pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi.
- Saving and borrowing*, bagian ini meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit.
- Insurance*, bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor.
- Investment*, bagian ini meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksa dana, dan risiko investasi.

PENGUKURAN LITERASI KEUANGAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI KEUANGAN

Studi mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap literasi keuangan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, dan umumnya terdapat 4 faktor demografi yang menjadi acuan utamanya yaitu, usia, jenis kelamin tingkat pendidikan dan pendapatan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lusardi & Mitchell bahwa untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan finansial, dapat diukur berdasarkan usia dan jenis kelamin, ras/etnis, pendapatan dan status kepegawaian, dan beberapa faktor lain dari menarik minat para peneliti.

1. Pengukuran berdasarkan faktor usia

Beberapa hasil penelitian terkait dengan tingkat literasi keuangan yang diukur berdasarkan usia, menunjukkan fakta bahwa gambaran tingkat literasi keuangan manusia mirip seperti punuk hewan mamalia (sapi). Dimana tingkat literasi keuangan para remaja adalah masih rendah, dan tingkat literasi paling tinggi ditemukan pada orang-orang dengan usia dewasa (antara 20-50 tahun), kemudian tingkat literasi yang rendah ditemukan kembali pada orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut (lansia). Temuan ini terjadi hampir disemua negara tempat penelitian dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengukur tingkat literasi keuangan berdasarkan faktor usia. Hal ini bisa menjadi sebuah konfirmasi mengapa beberapa penipuan dengan modus keuangan sering sekali terjadi pada orang-orang yang telah berusia lanjut (Deevy, Lucich, dan Beals 2012).

2. Pengukuran berdasarkan jenis kelamin

Secara empiris beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa gender atau jenis kelamin memberikan pengaruh besar pada tingkat literasi keuangan seseorang. Di mana secara jelas ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, hal ini berlaku hampir di semua jenjang usia, baik remaja, dewasa maupun lansia (Lusardi, Mitchell, dan Curto 2010; Lusardi dan Mitchell 2009; Lusardi dan Tufano 2009a, 2009b). Bahkan kesenjangan tingkat literasi ini juga berlaku pada aspek-aspek literasi yang lebih kompleks seperti produk perbankan, investasi, asuransi dan lainnya. Ada kecenderungan bahwa laki-laki bisa memberikan jawaban yang lebih tegas terhadap permasalahan keuangan yang dihadapinya, sedangkan pada wanita banyak ditemukan jawaban yang mengindikasikan mereka ragu atau bahkan tidak yakin dan tidak tahu.

Kesimpulan bahwa wanita memiliki tingkat literasi yang lebih rendah daripada pria berbanding lurus dengan beberapa hasil penelitian lain di lapangan yang membuktikan bahwa mayoritas korban dari penipuan keuangan di dominasi oleh kaum wanita. (Chen dan Volpe 2002; Mandell 2008). Dengan demikian menjadi penting untuk pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih memberikan perhatian lebih dalam hal sosialisasi literasi keuangan kepada kaum wanita agar lebih terhindar dari penipuan-penipuan bermodus keuangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan kaum wanita ini diindikasikan bahwa sebagian besar wanita tidak terbiasa hidup mandiri sejak kecil, beda dengan pria yang sebagian besar sudah terpisah hidupnya dengan orang tua. Namun demikian menjadi hal menarik dicermati dari hasil beberapa penelitian menunjukkan meskipun penelitian dilakukan untuk wanita dengan pendidikan yang tinggi, yang juga telah hidup terpisah dengan orangtuanya tetap saja ditemukan kualitas literasi keuangan mereka masih rendah dibandingkan laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama (Mahdavi dan Horton, 2012).

3. Pengukuran Berdasarkan Faktor Pendidikan

Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan terdapat perbedaan yang substansial di dalam pengetahuan keuangan bila dilihat dari faktor tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah, dalam hal ini mereka yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi memiliki literasi keuangan yang sangat rendah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi (Lusardi dan Mitchell 2007a, 2011c). Rendahnya literasi orang-orang yang berpendidikan rendah terutama terkait dengan masalah menghitung tingkat pendapatan, inflasi dan resiko yang mungkin terjadi pada masalah keuangannya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa rendahnya tingkat literasi ini didasarkan pada rendahnya aspek kognitif dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. (McArdle, Smith, dan Willis 2009).

Penemuan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena sudah menjadi sesuatu yang umum dimana orang-orang dengan pendidikan lebih rendah memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pendidikannya jauh lebih tinggi, dan dalam kasus ini tidak hanya terjadi di bidang literasi keuangan, namun juga di bidang-bidang pengetahuan lainnya.

4. Pengukuran berdasarkan Faktor Faktor lainnya

Hasil penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara, selain faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan, terdapat faktor lainnya yang secara empiris membuktikan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan seseorang. Misalkan saja karyawan dengan pendapatan rendah memiliki literasi keuangan lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang berpenghasilan tinggi, namun lebih tinggi literasi keuangannya dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja atau menganggur (Lusardi dan Tufano 2009a; Lusardi dan Mitchell 2011c). Beberapa penelitian

juga telah menemukan bahwa tingkat literasi juga dipengaruhi oleh perbedaan berdasarkan ras dan etnis, dimana orang-orang Afro-Amerika dan Hispanik memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah daripada penduduk etnis lainnya.(Lusardi dan Mitchell 2007a, 2007b, 2011b). Penemuan ini berlaku untuk seluruh kelompok usia dengan berbagai aspek literasi keuangan dan metode pengukuran (Lusardi dan Mitchell 2009). Selanjutnya ditemukan bukti juga bahwa penduduk yang hidup di daerah pedesaan umumnya memiliki literasi keuangan yang lebih buruk daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan (Klapper dan Panos 2011). Temuan ini mungkin menunjukkan bahwa literasi keuangan lebih mudah diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, di tempat kerja atau di dalam komunitas. Penelitian lain juga menunjukkan perbedaan dalam tingkat literasi keuangan dengan latar belakang keluarga. Misalnya, Lusardi, Mitchell, dan Curto (2010) menghubungkan literasi keuangan para responden dengan membedakan karakteristik latar belakang keluarga tempat mereka tumbuh, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan seseorang secara signifikan positif berkorelasi dengan pendidikan orang tua. Dan secara lebih dalam lagi penelitian dari Mahdavi and Horton (2012) menunjukkan bahwa hubungan antara literasi keuangan dan latar belakang orang tua; dalam hal ini, bahwa seorang ayah yang memiliki pendidikan lebih tinggi memberikan dampak positif pada literasi keuangan anak perempuan mereka. Dengan kata lain, pendidikan literasi keuangan mungkin bisa dimulai dalam keluarga, di mana seorang anak dapat belajar dari kebiasaan orang tua mengelola keuangan sehari-hari seperti berbelanja, menabung dan berinvestasi. Beberapa faktor lainnya juga dilaporkan telah memberikan pengaruh bagi tingkat literasi keuangan seperti agama (Alessie, van Rooij, dan Lusardi 2011) dan opini politik (Arrondel, Debbich, dan Savignac 2013).

Dari beberapa hasil penelitian tentang literasi keuangan, sejauh ini pengukuran dilakukan berdasarkan faktor demografi seperti faktor pendapatan, usia, gender, pendidikan, etnis, kelas dan agama.

Faktor-faktor demografis iniselanjutnya digunakan untuk melakukan pengamatan yang lebih luas tentang tingkat literasi keuangan konsumen. Misalnya, sejumlah survei literasi keuangan menemukan bahwa perempuan pada umumnya kurang melek secara finansial dibandingkan laki-laki. Remaja dan orang tua sering ditemukan memiliki tingkat literasi keuangan lebih rendah daripada orang dewasa. Serta kemampuan finansial yang lebih rendah juga lebih sering terdeteksi di antara kelompok etnis minoritas dan migran (Atkinson dan Messy 2012).

Dengan demikian, studi-studi ini memeringkat kelompok-kelompok sosial, seperti migran, berpenghasilan rendah, wanita dan muda, secara umum memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah. Beberapa survei internasional tentang literasi keuangan menggunakan negara sebagai unit pengukuran, dan memberi peringkat berdasarkan tingkat literasi keuangan. Literatur literasi keuangan OECD (*Organization of Economic Co-Operation and Development*) bisa dibilang salah satu yang paling banyak melakukan survei internasional yang sering digunakan untuk membandingkan tingkat literasi suatu negara(Zokaityte, 2017).

Literasi Keuangan Syariah adalah perluasan literasi keuangan dengan elemen yang sesuai dengan Islam. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat literasi keuangan syariah adalah kepemilikan rekening di lembaga keuangan syariah, pemahaman tentang produk dan jasa serta akad-akad syariah, pengetahuan tentang bagi hasil, dan jaminan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yaitu: 1)Jenis kelamin 2)Tingkat pendidikan 3)Tingkat pendapatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

KLASIFIKASI TINGKAT LITERASI KEUANGAN

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), tingkatan literasi keuangan seseorang dibedakan menjadi beberapa jenis tingkat, diantaranya yaitu: *well literate*, *sufficient literate*, *less literate*, dan *not literate*. Tingkat *well literate*, pada tingkatan ini seseorang dianggap memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan

serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, *sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, *less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan *not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Literasi Keuangan memberikan manfaat, seperti mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (www.ojk.go.id).

Menurut Kharchenko (2011), terdapat dua pendekatan untuk mengukur literasi keuangan:

a. *Self-assessment*

Menurut pendekatan pertama responden diminta untuk mengevaluasi kemampuan literasi mereka dengan memberikan informasi mengenai sikap mereka terhadap keputusan keuangan, pengetahuan, dan informasi. Pendekatan ini telah digunakan oleh Jappelli (2010) yang menunjukkan sebuah perbandingan internasional dari tingkat literasi pada 55 negara berdasarkan indikator literasi keuangan yang disediakan oleh IMD *World Competitive Yearbook* (WCY).

b. *Objective measures like test score*

Pendekatan kedua dalam mengukur literasi keuangan bergantung pada tes objektif yang menilai pengetahuan istilah keuangan dari responden, memahami berbagai konsep keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikan kemampuan numerik dalam keadaan khusus yang berhubungan dengan keuangan. Objektif tes telah ditemukan untuk menilai

pengetahuan keuangan responden dengan lebih baik daripada *self assessment* (OECD, 2005).

Uji literasi keuangan yang paling terkenal didasarkan pada tiga pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Lusardi dan Mitchel (2006), dimana pertanyaan ini dirancang selama 2004 pada *Health and Retirement Survey* (HRS) di Amerika Serikat. Tiga pertanyaan tersebut diujikan kepada responden mengenai bunga majemuk, inflasi dan keanekaragaman risiko, konsep penting untuk keputusan pembelajaran menabung dan kegiatan investasi (Kharchenko, 2011). Metodologi Lusardi dan Mitchell (2006) digunakan luas oleh peneliti-peneliti secara global. Cole *etal.* (2008) menggunakan metodologi ini untuk mengukur literasi keuangan di India dan Indonesia.

Lusardi dan Mitchell (2011a;2013) telah merancang pertanyaan-pertanyaan standar mengenai konsep literasi keuangan dan mengimplementasikannya dalam banyak survei di Amerika Serikat dan luar negeri. Empat prinsip yang digunakan dalam rancangan pertanyaan berikut adalah:

- a. Kesederhanaan, yaitu pertanyaan seharusnya mengukur pengetahuan dasar untuk membuat keputusan-keputusan dalam keadaan sementara.
- b. Relevansi, yaitu pertanyaan seharusnya menghubungkan konsep yang berkaitan dengan keputusan keuangan orang-orang sehari-hari selama siklus hidup; selain itu pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mencakup secara umum daripada konteks yang spesifik.
- c. Singkat, yaitu jumlah pertanyaan harus sedikit untuk mencegah pengambilan pertanyaan yang cakupannya terlalu luas.
- d. Kapasitas untuk membedakan, yaitu pertanyaan seharusnya dapat membedakan pengetahuan keuangan seseorang sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbandingan.

PERAN PESANTREN DALAM PENDIDIKAN LITERASI

PENTINGNYA PENDIDIKAN LITERASI KEUANGAN

Pendidikan literasi keuangan selalu penting bagi konsumen dalam membantu mereka menganggarkan dan mengelola pendapatan mereka, menabung dan berinvestasi secara efisien, dan menghindari menjadi korban penipuan. Namun, seiring pasar keuangan menjadi semakin canggih dan rumah tangga mengasumsikan lebih banyak tanggung jawab dan risiko untuk keputusan keuangan, pendidikan keuangan semakin diperlukan untuk individu, tidak hanya untuk memastikan kesejahteraan finansial mereka sendiri, tetapi juga untuk memfasilitasi kelancaran fungsi pasar keuangan dan ekonomi. Orang menciptakan permintaan untuk produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, secara finansial pelanggan yang melek aksara mendorong penyedia untuk mengembangkan produk dan layanan baru, sehingga meningkatkan persaingan di pasar keuangan, dengan peningkatan yang dihasilkan inovasi dan peningkatan kualitas. Pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan berkembang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai tambahan, pendidikan keuangan telah terbukti meningkatkan baik jumlah individu dengan tabungan dan jumlah rata-rata tabungan, yang seharusnya memiliki dampak penting pada tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Liebowitz, 2016).

Pendidikan keuangan adalah proses di mana konsumen keuangan/investor meningkat pemahaman mereka tentang produk dan konsep keuangan, melalui informasi, instruksi dan/atau saran yang obyektif, mengembangkan keterampilan dan keyakinan untuk menjadi lebih baik sadar akan risiko dan peluang keuangan, untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, untuk mengetahui kemana harus mencari bantuan, dan mengambil tindakan efektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Dimana:

- informasi menyediakan fakta, data, dan pengetahuan yang spesifik untuk membuat mereka sadar akan peluang, pilihan, dan konsekuensi keuangan ;
- instruksi memastikan bahwa individu memperoleh keterampilan dan kemampuan untuk memahami istilah dan konsep keuangan, melalui penyediaan pelatihan dan bimbingan; dan
- saran menyediakan konsumen dengan nasihat tentang keuangan umum masalah dan produk sehingga mereka dapat memanfaatkan keuangan sebaik-baiknya informasi dan instruksi yang telah mereka terima.

Pendidikan literasi keuangan perlu dibedakan dari perlindungan konsumen, meskipun ada beberapa persamaan di antara keduanya. Perlindungan konsumen dan pendidikan literasi keuangan memiliki beberapa tujuan yang sama tetapi masing-masing mengambil pendekatan yang agak berbeda. Namun pada intinya keduanya tujuan untuk memastikan kesejahteraan konsumen dan melindungi mereka dari risiko-risiko keuangan. Penyediaan informasi tentang masalah keuangan biasa terjadi untuk keduanya. Namun, pendidikan keuangan melengkapi informasi ini dengan penyediaan instruksi dan nasehat sementara perlindungan konsumen menekankan undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk menegakkan standar minimum, membutuhkan lembaga keuangan untuk menyediakan klien dengan informasi yang tepat, memperkuat perlindungan hukum konsumen ketika terjadi kesalahan, dan menyediakan sistem ganti rugi. Dengan kata lain, perlindungan konsumen menempatkan membebani lembaga keuangan dan sistem hukum sedangkan dengan pendidikan finansial, bebannya ada pada individu (Liebowitz, 2016).

Pentingnya pendidikan keuangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari perkembangan pasar keuangan dan demografi, ekonomi dan perubahan kebijakan. Pasar keuangan menjadi lebih canggih dan produk baru terus ditawarkan. Konsumen kini memiliki akses lebih besar ke berbagai instrumen kredit dan tabungan yang disediakan oleh berbagai entitas, dari sistem bank on-line dan perusahaan pialang untuk kelompok yang berbasis

komunitas. Keragaman dan kompleksitas produk keuangan yang ditawarkan di pasar keuangan saat ini, baik untuk investasi, tabungan, kredit, atau utang, dapat menantang bahkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan keuangan dasar. Itu bisa benar-benar luar biasa bagi mereka yang memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan keuangan. Namun individu di banyak negara sekarang harus membuat lebih banyak keputusan keuangan dan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk keputusan ini. Pada saat yang sama, banyak dari mereka memiliki sedikit persiapan untuk tanggung jawab keuangan yang mana mereka sekarang berhadapan. Konsekuensinya, sangat penting bahwa konsumen harus menjadi lebih terdidik mengenai masalah keuangan.

PONDOK PESANTREN DI INDONESIA

Istilah *pesantren* berasal dari kata *pe-santri-an*, dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah *Pondok* berasal dari Bahasa Arab *funduq* yang berarti penginapan. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut *lurah pondok*. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga Tuhan.

Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini semakin memperluas wilayah garapannya yang tidak melulu mengakselerasikan moralitas vertikal (dengan penjejalan materi-materi keagamaan), tetapi juga mobilitas horizontal (kesadaran sosial). Pesantren kini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (*regional-based curriculum*) dan cenderung melangit, melainkan kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian masyarakat (*society-based curriculum*). Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang merespon carut marut persoalan masyarakat di sekitarnya.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk di negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.

Sebab-sebab terjadinya modernisasi pesantren diantaranya: Pertama, munculnya wacana penolakan *taqlid* dengan “kembali kepada Al-Qur’an dan sunah” sebagai isu sentral yang dimulai sejak tahun 1990. Maka sejak saat itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda, atau kalangan reformis dengan kalangan ortodoks/konservatif, mulai mengemuka sebagai wacana publik. Kedua, kian mengemukanya wacana perlawanan nasional atas kolonialisme Belanda. Ketiga, terbitnya kesadaran kalangan Muslim untuk memperbaharui organisasi keislaman mereka yang berkonsentrasi pada aspek sosial ekonomi. Keempat, dorongan kaum Muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam. Salah satu dari keempat faktor tersebut dalam pandangan Karel A. Steenbrink, yang sejatinya selalu menjadi sumber inspirasi para pembaharu Islam untuk melakukan perubahan Islam di Indonesia (<http://id.wikipedia.org>).

Secara umum Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 5 elemen pokok; (1) Pondok/Asrama: adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi pondok pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia, (2) Masjid: merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dll, (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: merupakan tujuan utama pendidikan di pondok pesantren, (4) Santri: merupakan sebutan untuk siswa/murid yang belajar di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik (Dhofier, 1982).

Data Pondok Pesantren di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 27.218, dengan Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500(12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 13.446 (49,4%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 10.708(39,3%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 3,064 (11,3%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia sebagian besar masih pada tipologi Salafiyah, yang pembelajarannya masih murni mengaji dan membahas kitab kuning. Sebagian lain sudah modern dengan pengembangan pembelajaran ilmu umum dan sebagian lain lagi mengkombinasikan pembelajaran kitab kuning dan ilmu umum dan iptek.

Jumlah santri Pondok Pesantren secara keseluruhan adalah 3.759.198 orang santri, terdiri dari 1.886.748 orang santri laki-laki (50,19%), dan 1.872.450 orang santri perempuan (49,81%) dan hampir seluruh santri yang mendapat pendidikan di pondok pesantren bermukim (79,93%). Hal ini dikarenakan memang dalam pembelajaran di pondok pesantren, waktu belajar adalah hampir 24 jam penuh.

Tenaga Pengajar Pondok Pesantren seluruhnya berjumlah 153.276 orang pengajar, terdiri dari 102.495 orang (66,87%) pengajar laki-laki dan 50.781 orang (33,13%) pengajar perempuan. Berdasarkan informasi tersebut, tenaga pengajar di Pondok Pesantren di dominasi oleh tenaga pengajar laki-laki. Jumlah Tenaga Pengajar jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, berpendidikan <S1 sebanyak 108.816 orang (70,99%), dari jumlah tersebut 74.398 orang (68,37%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 34.418 orang (31,63%), berkualifikasi pendidikan S1 sebanyak 42.019 orang (27,42%), dari jumlah tersebut 26.212 orang (63,38%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 15.807 orang (37,62%), dan berkualifikasi pendidikan \geq S2 berjumlah 2.441 orang (1,59%), dari jumlah tersebut 1.885 orang (77,22%) berjenis

kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 556 orang (22,78%). Jumlah Tenaga Pengajar jika dilihat berdasarkan jabatan, Kyai berjumlah 29.583 orang (19,30%), dari jumlah tersebut 27.559 orang (93,16%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.024 orang (6,84%), Badal Kyai berjumlah 8.161 orang (5,32%), dari jumlah tersebut 6.351 orang (77,82%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.810 orang (22,18%), Ustadz/guru berjumlah 115.532 orang (75,38%), dari jumlah tersebut 68.585 orang (59,36%) berjenis kelamin laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 46.947 orang (40,64%). Dari data yang diperoleh terdapat 3.759.198 orang santri dan terdapat 153.276 orang guru/ustadz di Pondok Pesantren sehingga rasio ustadz : siswa pada Pondok Pesantren adalah 25, ini bermakna bahwa pada setiap pondok pesantren di Indonesia terdapat 1 orang guru/ ustadz untuk membina 25 orang santri. Kondisi ini masih cukup ideal.

PESANTREN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI

Dalam perjalanannya, pesantren ternyata tidak terjebak dan berkutat dari satu kitab ke kitab. Pesantren bukan lagi menjadi tempat pendidikan an sich. Peran-peran sosial banyak dilakukan oleh pesantren dengan segala pola adaptasinya. Bahkan pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, pesantren juga berperan penting di bidang politik, keamanan dan pertahanan negara. Kondisi tersebut memberikan indikator bahwa pesantren bukanlah “menara gading” yang tidak berpijak pada lingkungannya. Berkembang lebih jauh, sosok pesantren di era modern ini tidak hanya sebagai agen pendidikan ilmu keagamaan semata, namun juga turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan (sains). Pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan umat dalam melawan penjajah; maka pada tahun 1980-an, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dunia pesantren memperoleh tambahan fungsi baru, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang kemudian dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat. Kita kenal beberapa

pesantren, misalnya Pesantren Darul Falah Bogor, Pesantren Pabelan Magelang, Pesantren Kajen Pati, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren An-Nuqayah Madura, dan sebagainya yang dijadikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Kemudian di era 2000-an, pesantren memperoleh tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka muncullah pesantrendengan ciri khasnya mengembangkan koperasi, seperti pesantren Sidogiri Jawa Timur. Hal ini menandai bahwa dunia pesantren sesungguhnya tidak sepi dari inovasi yang terus menerus dilakukan. Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka pondok pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dapat dikerucutkan pada empat fungsi utama, yaitu:

1. Pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*);
2. Institusi yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*);
3. Lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*); dan,
4. Ponpes sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*)(Suhartini dalam Halim et al., 2005: 233).

Dalam setiap komunitas, dapat dipastikan terdapat kekuatan yang mampu untuk mengubah dinamika yang terjadi di komunitas tersebut. Ulama merupakan salah satu entitas yang mempunyai potensi untuk melakukan kontestasi dengan entitas yang lain untuk melakukan rekayasa sosial. Untuk suatu komunitas yang tergolong religius, kekuatan pemuka agama (ulama) menjadi sangat sentral, yang nyaris mustahil untuk dinafikan. Potensi yang dimiliki ulama terkait dengan kharisma yang dimilikinya. Hiroko Horikoshi (1987) dan Clifford Geertz (1981) memperkuat teori mengenai peran penting ulama dalam suatu komunitas melalui serangkaian studi yang mereka bangun. Istilah *cultural brokers* adalah salah satu gambaran bagaimana fungsi seorang ulama. Istilah tersebut menunjukkan fungsi mediasi yang dapat

dilakukan ulama untuk mengkomunikasikan—atau bahkan memadupadankan— antara berbagai kepentingan yang muncul di suatu komunitas. Ulama dapat berperan sebagai “corong” suatu kepentingan dan tujuan tertentu karena kekuatan yang mereka miliki, sehingga tidak jarang ada beberapa kepentingan yang sifat *short-term* dan sangat profan yang “mendompleng” kekuatan ulama, yang sejatinya kurang sesuai dengan kapasitasnya sebagai “pewaris para nabi.” Pada sisi lain, ulama adalah sumber legitimasi keagamaan dan penggerak perubahan masyarakat. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Horikoshi (1987), ditemukan bahwa ulama adalah sumber perubahan sosial; tidak saja bagi lingkungan pesantren akan tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh studi Geertz(1981) dimana ditunjukkan bahwa pengaruh kyai/ulama terletak pada makelar kultur (*cultural brokers*). Melalui pengaruhnya sebagai *cultural brokers* tersebut, ulama secara sosial mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan. Demikian halnya dalam dunia pesantren, pesantren (sebagai sebuah institusi) dan kyai memainkan peran sosial yang sangat vital. Pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga dalam tugas-tugas *social engineering*, dan sebagai lembaga dakwah Islam. Di dunia pesantren, kyai masih merupakan simbol kekuatan keilmuan dan top figur sekaligus top leader dalam penentuan keputusan dan kebijakan. Otoritas tersebut melekat kuat pada diri seorang kyai (Lukens-Bull, 2005: 92; Dhofier, 1994).

Dalam perspektif ekonomi, ulama dapat diposisikan dalam fungsi seorang marketer dalam sebuah bisnis. Dalam spiritual marketing, ulama menempati posisi sebagai marketer yang bermain pada wilayah *heart-share*. Wilayah ini mengajak calon konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi dengan menggunakan potensi kejernihan hati yang didorong oleh sekumpulan nilai-nilai positif. Tindakan yang berbasis pada nilai-nilai positif ini akan berfungsi sebagai filter dari tindakan konsumsi yang terkontaminasi oleh polusi-polusi-paradigma positivistik-materialistik. Tugas ini diemban oleh mereka yang dianggap sebagai figur yang mengawal kejernihan hati, mengawal nilai-nilai positif, dan mengawal komunitas dari polusi-polusi negatif; dan mereka itu adalah para ulama.

Selain sebagai *cultural broker* dan *marketer*, peran ulama juga dapat sebagai kelompok acuan atau *reference group*. Ulama diposisikan sebagai figur panutan dan menjadi rujukan bagi suatu komunitas dalam menentukan sikap dan perilaku mereka. Tidak sedikit keputusan suatu komunitas yang menunggu dan menggunakan sikap ulama sebagai pertimbangan. Dalam posisinya sebagai kelompok acuan inilah, ulama dapat memengaruhi komunitasnya untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu. Dengan digunakannya sebagai sandaran komunitas, secara kultural ulama mempunyai kekuatan dan peran dalam menentukan dinamika suatu kelompok.

Ekonomi syariah, baik sebagai sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi (*economics*) lahir dari rahim para intelektual Muslim. Ekonomi syariah yang lahir dan berkembang dengan berbagai latar belakang dan kepentingan pada dasarnya bertujuan untuk “mensyariahkan” umat, sehingga umat semakin mendekati derajat sebagai Muslim yang sempurna (*kaffah*). Upaya “mensyariahkan” umat (tidak terkecuali mensyariahkan di bidang ekonomi) menjadi tugas setiap komponen masyarakat dan institusi-institusi keislaman lainnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pesantren mempunyai peran sebagai agen perubahan sosial. Terkait dengan peran pesantren dan mensyariahkan ekonomi umat, pesantren dapat berperan sebagai agen Perubahan Sosial di Bidang Ekonomi Syariah. Kyai selain merupakan salah satu unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren, juga berada pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena ia dianggap sebagai pemilik, pengelola, pengajar kitab kuning sekaligus sebagai imam (pemimpin). Ini berarti bahwa tradisi keagamaan pesantren yang berkembang dalam komunitas itu telah mampu membangun sub kulturenya sendiri, yang cenderung terkesan tertutup dan eksklusif. Padahal pesantren merupakan bagian integral dari kultur masyarakat sekitarnya termasuk sistem pendidikan yang berlaku di dalamnya.

Pesantren dengan kyai yang melekat didalamnya, masih memainkan peran sosial yang sangat besar bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun teknologi informasi dan modernisasi terus mendera

dinamika kehidupan individu Muslim, namun kyai dan pesantren tetap menjadi tembok kokoh yang membentengi masyarakat dari penyakit-penyakit yang muncul dari budaya-budaya modern. Peran dan potensi di bidang sosial inilah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dimotori oleh kalangan pesantren. Mengembangkan ekonomi syariah merupakan bagian dari rekayasa sosial agar tercipta masyarakat yang ideal menurut Islam yang selama ini diupayakan oleh pesantren.

PESANTREN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN EKONOMI SYARIAH

Pesantren merupakan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingatkan masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional. Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang ditunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren dapat berperan sebagai produsen yang mensuplai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri (kerajinan kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa pesantren adalah rahim dari embrio intelektual Muslim di Indonesia. Pesantren, ibarat penyedia cendekiawan Muslim di Indonesia yang sangat signifikan. Melalui "spesialisasi" dan keunikan yang dimiliki oleh pesantren, maka sangat besar potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk melahirkan para ekonom Muslim yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih lagi, jika menilik pada genealogi ilmu ekonomi syariah yang justru lebih dulu

berkembang di luar pesantren. Ilmu ekonomi syariah lahir dari rahim intelektual Muslim kampus, akademisi dan sebagian pengusaha. Umumnya, penguasaan mereka terhadap ilmu-ilmu kesyariahan, turats, kitab-kitab kuning klasik, maupun *muamalat maliyah* masih di belakang dari mereka yang lahir dari dunia pesantren. Ekonomi syariah membutuhkan Sumber Daya Manusia/Insani (SDM/I) yang mendalami *fiqih muamalah*, *qawaid fiqhiyyah*, *qawaid ushuliyyah*, dan sejenisnya untuk terhindar dari perilaku distortif terhadap syariah. Salah satu problem ekonomi syariah saat ini adalah bahwa ia dikembangkan oleh kalangan yang belum sempurna pemahamannya dengan tradisi dan istilah kunci dalam bahasa Arab yang melekat dalam fiqih muamalah, yang berisiko pada rapuhnya penguasaan teoritis. Padahal ekonomi syariah baik sebagai sebuah sistem ekonomi maupun sebagai ilmu ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari khazanah keilmuan Islam yang telah diletakkan sebelumnya oleh para cendekiawan muslim. Pesantren sangat berpotensi untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da'i yang diakui masyarakat.

Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu, mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengardaripada ulama dan da'i produk lembaga non-pesantren. Kelebihan lainnya, mereka lebih menguasai fiqih muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat dengan lebih baik. Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, *up-to-date*, dan mempunyai kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya

dengan mengakomodasi muatan *fiqih muamalah ashriyyah* yang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer (Syakur, 2009).

METODOLOGI PENELITIAN LITERASI KEUANGAN

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran lengkap dari proses dan makna terhadap fenomena yang terjadi (Moleong, 2002:20) yaitu mengenai literasi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren.

Pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari observasi, wawancara, dan pengumpulan data di lapangan melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan atau yang pokok. Data sekunder berupa publikasi yang terkait dengan topik penelitian dan *desk study*.

Menurut Moh. Nazir (1998) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif: Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti atau menganalisis status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah mempelajari dan menggambarkan keadaan organisasi. Data-data yang dimiliki organisasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sikap, pandangan serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Lebih lanjut menurut Nazir (1999:163) dinyatakan bahwa, pengkajian dalam penelitian deskripsi adalah suatu metode dalam meneliti sekompok komunitas/orang/manusia yang berada pada suatu komunitas tertentu untuk selanjutnya dikatakan sebagai suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan menurut Isaac dan Michael dalam Djalaluddin Rahmat (2001:22) menyatakan bahwa metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner yang kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode

kuantitatif dan metode kualitatif dengan alat bantu statistik sebagai dasar pengujian hipotesis.

Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong (2000:3) menyatakan: "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara *holistic* (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan".

Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994: 174) menyatakan penelitian kualitatif atau penelitian *naturalistik* adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak diubah dalam bentuk simbol- simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif sesuai dengan pengertian yang telah diuraikan diatas bermaksud menemukan kebenaran berupa generalisasi yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) manusia, terutama peneliti sendiri (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994: 175-176).

Berdasarkan uraian di atas penelitian kualitatif diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana literasi keuangan di kalangan pengelola pondok pesantren di wilayah Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan adalah: deskriptif survey dan explanatory survey. Objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti dalam hal ini adalah tingkat literasi keuangan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Subjek pada penelitian ini adalah para pengelola dan guru di pondok pesantren.

Pengamatan menggunakan cakupan waktu "*one shoot*"/*cross sectional* yaitu kurang dari satu tahun. Untuk penelitian deskriptif, digunakan metode *cross-sectional*, dimana *cross-sectional* merupakan kegiatan riset pada satu saat tertentu, selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dilakukan penyimpulan mengenai masalah-masalah penelitian yang ingin dibuktikan atau dicari hubungannya (Rangkuti, 2011:20). Jangka

waktu penelitian akan dilakukan selama 6 bulan yaitu Bulan Mei sampai Bulan Oktober 2018. Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren di kawasan Wilayah III Cirebon (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka).

SumberInformasi

Sumber informasi dipilih secara *purposive sampling* adalah sebagai pengambilan sampel sumber data yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Penggunaan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil sampel secara subjektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumbernya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian (Sugiono,2005:52).

Adapun yang menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Pimpinan pondok, guru, dan para mudaris di pondok pesantren. Sumber informasi ini berasal dari populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas maupun karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). Berdasarkan data di Pendis Kemenag tahun 2018 jumlah populasi santri di Jawa barat berjumlah 17.560 orang, dan untuk wilayah III Cirebon sekitar 8.570 orang.

Kemudian dari populasi akan diambil sampel sebagai responden dalam penelitiain ini, teknik yang digunakan adalah *cluster proportional random sampling* dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Isaac* dan *Michel* dalam Sugiyono (2012:86). Penentuan jumlah sampel untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10% dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$s = \frac{X^2.N.P.Q}{d^2(N-1) + X^2.P.Q}$$

Dimana:

S = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

X² = Nilai chi kuadrat dengan derajat kebebasan = 1, dan

- taraf kesalahan 5% ($\alpha = 5\%$)
- P = Peluang untuk menerima bahwa suatu peristiwa dikatakan betul, dengan asumsi nilai = 0,5 (50%)
- Q = Peluang untuk menerima bahwa suatu peristiwa dikatakan salah, dengan asumsi nilai = 0,5 (50%)
- D = Nilai presisi/persentase perbedaan jawaban dari angket untuk setiap item pertanyaan, dengan asumsi nilai = 0,05 (5%)

Berdasarkan rumus dan asumsi di atas, diperoleh sampel sebanyak 300 orang responden.

Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam Lexy Moleong (2000:112), sumber data utama dari penelitian ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan secara langsung maupun secara tidak langsung yakni dengan cara melakukan wawancara dengan pimpinan pondok pesantren, guru-guru, mudaris-mudaris dan sebagian santri.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang didapat dari studi kepustakaan yang diperoleh dengan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka sebagai teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, literatur-literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Guna memperoleh data sekunder prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan memilah-milah bahan-bahan yang bersumber pada kepustakaan seperti peraturan

perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Literasi keuangan (*financial literacy*) dan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*) keduanya merupakan modal bagi setiap orang untuk mengelola keuangannya dengan benar, namun memiliki konstruksi yang berbeda. Pengetahuan finansial merupakan dimensi integral dari konsep keuangan secara menyeluruh. Sedangkan literasi keuangan memiliki dimensi yang lebih menekankan pada unsur kemampuan dan keyakinan seseorang untuk menggunakan pengetahuan finansialnya dalam membuat keputusan keuangan. Ketika mengembangkan instrumen untuk mengukur literasi keuangan, akan menjadi penting untuk menentukan tidak hanya jika seseorang mengetahui informasi keuangan tetapi juga jika dia dapat menerapkannya dengan tepat.

b. Studi Lapangan

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan pondok pesantren, guru-guru, mudaris-mudaris dan sebagian santri.

2. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok sesuai dengan bahasan. Selanjutnya terhadap data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
- b. Klasifikasi Data yaitu pengelompokan data menurut kerangka yang telah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data. Untuk mendapatkan gambaran tingkat literasi finansial di kalangan pengelola dan guru di pondok pesantren, faktor-faktor yang menentukan tingkat literasi dan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang harus diambil maka digunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pengukuran dan analisis deskriptif tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis statistik. Di sini akan dicoba diidentifikasi

faktor demografi dalam menentukan tingkat syariah financial literation melalui model analisis regresi logistik biner (*binary logistic regression*). Faktor demografi yang diteliti adalah jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, dan pekerjaan.

Tingkat literasi dihitung berdasarkan *mean* atau rata-rata dari setiap pertanyaan survey dan mengelompokkannya ke dalam dua kategori. Pengelola (guru) dengan skor yang lebih tinggi dari mean (nilai rata-rata) diklasifikasikan sebagai pengelola yang memiliki pengetahuan finansial syariah yang lebih tinggi, sedangkan pengelola (guru) dengan skor yang sama atau di bawah *mean* (nilai rata-rata) diklasifikasikan sebagai pengelola yang memiliki pengetahuan finansial syariah yang rendah.

Model Penelitian

Model verifikatif yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik regresi logistik biner (*binary logistic regression*) untuk melihat pengaruh jumlah variabel independen X_1, X_2, \dots, X_k terhadap variabel dependen Y yang merupakan variabel *response biner* yang hanya mempunyai dua nilai atau juga memprediksi nilai suatu variabel dependen Y (yang berupa variabel biner) berdasarkan nilai-nilai variabel independen X_1, X_2, \dots, X_k . Ditetapkan $\alpha = 0,1$ sebagai taraf kesalahan yang dapat ditolerir.

Persamaan regresi logistik biner (*binary logistic regression*) pada penelitian ini adalah:

$$\ln(p/1-p) = \beta_0 + \beta_1(JK) + \beta_2(U1) + \beta_3(U2) + \beta_4(U3) + \beta_5(TA1) + \beta_6(TA2) + \beta_7(TA3) + \beta_8(FAK) + \beta_9(PK1) + \beta_{10}(PK2) + \beta_{11}(PK3) + \beta_{12}(PK4) + \beta_{13}(LK)$$

Dimana :

P = peluang bahwa pengelola dan guru memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang lebih tinggi

$JK = 1$ jika responden laki-laki, 0 jika wanita

$U1 = 1$ jika responden berusia 20-25 tahun, 0 jika bukan

$U2 = 1$ jika responden berusia 26-30 tahun, 0 jika bukan

$U3 = 1$ jika responden berusia lebih dari 30 tahun, 0 jika bukan

$TA1 = 1$ jika responden pengelola, 0 jika bukan

$TA2 = 1$ jika responden guru, 0 jika bukan

TA3= 1 jika responden staf, 0 jika bukan
PK1 = 1 jika responden tidak memiliki pengalaman kerja, 0 jika bukan
PK 2 = 1 jika responden memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun, 0 jika bukan
PK3 = 1 jika responden memiliki pengalaman kerja 1-2 tahun, 0 jika bukan
PK4 = 1 jika responden memiliki pengalaman kerja > 2 tahun, 0 jika bukan
LK = 1 jika pimpinan pondok (sekolah), 0 jika bukan

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Data yang diperoleh melalui kuesioner berskala pengukuran ordinal, maka skala pengukuran tersebut harus ditransformasikan dahulu menjadi skala interval yaitu dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Proses transformasi data dengan menggunakan MSI merupakan salah satu cara untuk mengoperasikan data berskala ordinal menjadi data berskala interval.

Langkah-langkah proses transformasi dengan MSI adalah sebagai berikut (Riduwan dan Engkos, 2007:30):

1. Menghitung distribusi frekuensi setiap pilihan jawaban responden.
2. Menghitung proporsi dari setiap jawaban berdasarkan distribusi frekuensi .
3. Menghitung proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.

4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal.
5. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas.
6. Menghitung *scale value* (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{Scale Value} = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{\text{Area below upper limit} - \text{Area below lower limit}}$$

7. Menghitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{Score} = \text{Scale Value} + \text{Scale Value}_{\text{minimum}} + 1$$

8. Pada penelitian ini telah digunakan *spreadsheet* untuk menghitung MSI (menggunakan microsoft excel), sehingga semua data dari kuesioner (skala ordinal) telah ditingkatkan menjadi skala interval.

Pada pelaksanaannya, perhitungan MSI dalam penelitian ini menggunakan *software successive interval*, sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

a. Uji Validitas

Sebelum diproses data terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk menguji alat ukur atau kuesioner. Validitas atau kesahihan menunjukkan pada kemampuan suatu instrument (alat pengukur) mengukur apa yang harus diukur (Uhar, 2012:98). Langkah-langkah pengujian validitas adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur

2. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden
3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban
4. Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product moment* Pearson, yaitu:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = koefisien korelasi product moment

X = skor masing-masing butir suatu variabel

Y = skor total seluruh butir dalam suatu variabel

N = banyaknya subjek atau jumlah responden

Keputusan mengenai validitas item pertanyaan dalam kuesioner yaitu: jika r positif serta $r \geq 0,30$ maka item pertanyaan tersebut valid, sedangkan jika r tidak positif atau $r < 0,30$, maka item pertanyaan tersebut tidak valid (Kaplan & Sacuzzo, 1993: 106).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas didefinisikan sebagai parameter yang menyatakan suatu alat ukur dapat dipercaya (*reliable*). Kaplan & Sacuzzo (1993: 123) menyatakan bahwa sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur variabel tersebut jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,70.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai alat bantu pengolahan data statistik, yaitu program Lisrel, dan menggunakan metode (rumusan) koefisien *Alpha Croanbach's* dan merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*. Adapun rumusan *Alpha Croanbach's* sebagai berikut.

$$r_{yx} = \alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum_{j=1}^k \sigma_{xj}^2}{\sigma_y^2} \right]$$

Keterangan:

r_{xy} = Nilai koefisien reliabilitas *Alpha Croanbach's*

- K = Jumlah item pertanyaan
 σ_{xj}^2 = Varians dari item ke-J
 σ_y^2 = Varians skor total dari responden

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

d. Uji Linearitas Garis Regresi

Pengujian terakhir yang harus dilakukan adalah linearitas model regresi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa variabel-variabel yang dirumuskan dalam model teoritik penelitian mempunyai hubungan linear secara nyata (Nidjo Sandjojo, 2011:91).

Adapun langkah-langkah untuk menguji linearitas menurut Nidjo (2011:209) adalah sebagai berikut:

1. Mencari Jumlah Kuadrat Error (JK_E) dengan rumus:

$$JK_E = \sum \{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \}$$

2. Mencari Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (JK_{TC}) dengan rumus:

$$JK_{TC} = JK_{Res} - JK_E$$

3. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Tuna Cocok (RJK_{TC}) dengan rumus:

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k-2}$$

4. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat Error (RJK_E) dengan rumus:

$$RJK_E = \frac{JK_E}{n-k}$$

5. Mencari nilai F_{hitung} dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E}$$

6. Membuat kesimpulan, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya linear.

e. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi loyalitas nasabah yang dinyatakan dalam persentase, koefisien determinasi menurut Sugiyono (2012:210) dapat dihitung dengan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana : Kd = seberapa jauh perubahan variabel tidak bebas

r = kuadrat koefisien korelasi

f. Rancangan Uji Hipotesis

Pengaruh langsung (koefisien jalur) diamati dari bobot regresi terstandar, dengan pengujian signifikansi pembandingan nilai CR (*Critical Ratio*) yang sama dengan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} berarti signifikan.

Pengembangan Hipotesis

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengukur dan menganalisis tingkat literasi keuangan, namun masih sedikit penelitian yang mengukur dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Rose Abdullah dan Ahmad Lutfi Abdul Razak (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Exploratory Reseach Into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam*" penelitian ini secara garis besar menyimpulkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membayar zakat, terutama zakat maal. Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Brunei Darussalam juga berdampak pada rendahnya akses masyarakat pada produk-produk keuangan syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, takaful dan produk-produk keuangan syariah lainnya.

Mohamad Azmi Abdullah dan Rosita Chong (2014) juga melakukan penelitian terkait dengan literasi keuangan syariah dengan judul "*Financial Literacy : An Exploratory Review of Literature and Future Reseach*" yang menyimpulkan bahwa dengan semakin berkembangnya institusi-institusi dan produk-produk keuangan syariah berdampak cukup signifikan pula terhadap tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Malaysia.

Berdasarkan kajian literatur-literatur sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1 : Tingkat Literasi Keuangan Syariah di kalangan Pondok Pesantren masih rendah berada pada rentang *less literate – sufficient literate*.

Siti Hafidzah Abdul Rahim (2015) melakukan penelitian berjudul *Psychological Factors and Gender Influencing The Level of Islamic Financial Literacy*. Penelitian ini menilai tingkat literasi keuangan Islam di kalangan mahasiswa S1 Keuangan dan Perbankan Syariah di Universitas Utara Malaysia. Tujuan penelitian adalah untuk menguji faktor psikologis seperti ketidakberdayaan, religiusitas, kepuasan keuangan dan gender terhadap literasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Islam di kalangan responden (mahasiswa) tinggi. Perbedaan yang signifikan dalam literasi keuangan Islam ditemukan antara responden menurut jenis kelamin (*gender*) dan lamanya masa studi, bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan Islam yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara mahasiswa tingkat tiga memiliki tingkat literasi keuangan Islam yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa tingkat satu dan dua. Hasil penelitian diperoleh hubungan yang signifikan antara faktor psikologis, ketidakberdayaan, religiusitas, dan gender terhadap literasi keuangan Islam.

Di Indonesia juga terdapat penelitian yang mengkaji tingkat literasi keuangan syariah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zara Fathia Muflihani dan Irfan Syauqi Beik (2015) yang berjudul "*Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro terhadap Perbankan Syariah*". Metode penelitian menggunakan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% responden memiliki tingkat literasi yang rendah, 28,57% responden memiliki tingkat literasi sedang, dan 31,43% memiliki tingkat literasi tinggi. Tingkat literasi perbankan syariah dapat mempengaruhi sikap responden terhadap lembaga perbankan syariah. Semakin tinggi literasi masyarakat terhadap perbankan syariah maka semakin memudahkan upaya mengajak masyarakat lainnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi (2013) dengan judul "*Determinan Tingkat Literasi Masyarakat terhadap*

Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)'. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan individu terhadap muamalah di dalam Islam dan upaya promosi yang dilakukan perbankan syariah berpengaruh terhadap literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan promosi oleh pemerintah tidak berpengaruh.

Berdasarkan kajian literatur-literatur sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2 : Faktor gender, usia, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan syariah.

H3 : Tingkat Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi keuangan syariah di kalangan Pondok Pesantren.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rike Setiawati (2014) yang berjudul *Literasi Keuangan Islam (Suatu telaah Literatur)*. Metode telaah yang digunakan adalah review sistematis yang bersumber dari berbagai rujukan jurnal yang berupa penelitian empiris dan kajian konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian literasi keuangan umumnya menemukan kondisi yang masih relatif rendah dilihat dari penggunaan akses di sektor keuangan formal maupun informal. Kondisi literasi keuangan Indonesia yang relatif rendah ini didukung adanya tingkat kemiskinan yang relatif tinggi namun berbanding terbalik dengan pertumbuhan industri perbankan syariah dan aktivitas pasar modal syariah telah menunjukkan kemajuan. Artinya, kehadiran institusi tersebut yang seharusnya mendorong pergerakan ekonomi syariah, tetapi sejauh ini hanya melayani masyarakat yang *feasible* dan *bankable*, serta relatif belum menjangkau masyarakat golongan miskin yang mayoritas muslim. Sementara penelitian literasi keuangan saat ini masih terbatas pada lingkup masyarakat kelas menengah dan atas, belum menjangkau lapisan terbesar pembentuk literasi yaitu lapisan *chronic poor*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian tentang literasi keuangan syariah ini akan mengukur tingkat literasi sekaligus pengaruhnya terhadap

preferensi, dan penelitian diperdalam dengan adanya kajian pada aspek implikasinya bagi lembaga keuangan syariah.

PROFIL PONDOK PESANTREN DI WILAYAH III CIREBON

PONDOK PESANTREN DI WILAYAH III CIREBON

Berikut adalah profil pondok pesantren dan pengelola pondok pesantren berdasarkan; jenis kelamin, usia responden, pendidikan terakhir, rekening bank, profesi responden, pendapatan responden, pengeluaran responden, lokasi pondok pesantren dan jenis pondok pesantren.

1. Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon

Pondok Pesantren Ulumuddin, NSPP 511232755033 berdiri pada tahun 1987. Pondok Pesantren Ulumuddin beralamat di Jl. Sekar Kemuning No.217 Rt.04/03 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi, Kesambi, Kabupaten Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Ulumuddin mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Lainnya. Jumlah santri di Pesantren Ulumuddin adalah 155, dengan rincian jumlah santri pria berjumlah 40 orang dan santri perempuan berjumlah 115 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 7 orang. Jumlah Santri 155 orang.

2. Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kabupaten Cirebon

Pondok Pesantren Al Istiqomah, NSPP 512321111167 berdiri pada tahun 0. Pondok Pesantren Al Istiqomah beralamat di Desa Buntet Pesantren, Astanajapura, Kabupaten Cirebon , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Al Istiqomah mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Tidak Ada. Jumlah santri di Pesantren Al Istiqomah adalah 118, dengan rincian jumlah santri pria berjumlah 43 orang dan santri perempuan berjumlah 75 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 11 orang. Jumlah Santri 118 orang.

3. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Kabupaten Cirebon

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, NSPP 512321128370 berdiri pada tahun 1993. Pondok Pesantren Kebon

Jambu Al-Islamy beralamat di Jln. Kebon Jambu No. 01 Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Industri Kecil (Home Industri). Jumlah santi di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy adalah 724, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 724 orang dan santri perempuan berjumlah 0 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 127 orang. Jumlah Santri 724 orang.

4. Pondok Pesantren As-Sakienah Kabupaten Indramayu

Pondok Pesantren As - Sakienah, NSPP 510032120146 berdiri pada tahun 1990. Pondok Pesantren As - Sakienah beralamat di Jl. Raya Pu Tugu, Kec. Sliyeg, Sliyeg, Kabupaten Indramayu , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren As - Sakienah mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Perikanan/Kelautan/Maritim. Jumlah santi di Pesantren As - Sakienah adalah 485, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 225 orang dan santri perempuan berjumlah 260 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 28 orang. Jumlah Santri 485 orang.

5. Pondok Pesantren Al-Ishlah Tajug Kabupaten Indramayu

Pondok Pesantren Al Ishlah Tajug, NSPP 510032120073 berdiri pada tahun 1994. Pondok Pesantren Al Ishlah Tajug beralamat di Ds. Sudimampir Kec. Balongan, Balongan, Kabupaten Indramayu , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Al Ishlah Tajug mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Perikanan/Kelautan/Maritim. Jumlah santi di Pesantren Al Ishlah Tajug adalah 567, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 274 orang dan santri perempuan berjumlah 293 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 61 orang. Jumlah Santri 567 orang.

6. Pondok Pesantren Cadang Pinggan Kabupaten Indramayu

Pondok Pesantren Cadang Pinggan, NSPP 510032120023 berdiri pada tahun 1996. Pondok Pesantren Cadang Pinggan beralamat di By Pass Cadangpinggan, Sukagumiwang,

Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Cadang Pinggan mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Perikanan/Kelautan/Maritim. Jumlah santi di Pesantren Cadang Pinggan adalah 3.600, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 600 orang dan santri perempuan berjumlah 3000 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 8 orang. Jumlah Santri 3.600 orang.

7. Pondok Pesantren Al-Mutawally Kabupaten Kuningan

Pondok Pesantren Al-Mutawally, NSPP 512321018006 berdiri pada tahun 1995. Pondok Pesantren Al-Mutawally beralamat di Jl. Pesantren No. 177 Dusun Pahing RT. 11 RW. 04 Desa Bojong 45556, Cilimus, Kabupaten Kuningan , Propinsi Jawa Barat. Jumlah santi di Pesantren Al-Mutawally adalah 425, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 163 orang dan santri perempuan berjumlah 262 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 40 orang. Jumlah Santri 425 orang.

8. Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan

Pondok Pesantren Husnul Khotimah, NSPP 510332081902 berdiri pada tahun 1994. Pondok Pesantren Husnul Khotimah beralamat di DESA MANISKIDUL, Jalaksana, Kabupaten Kuningan , Propinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Husnul Khotimah mempunyai potensi di bidang ekonomi yaitu Tidak Ada. Jumlah santi di Pesantren Husnul Khotimah adalah 2.375, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 1124 orang dan santri perempuan berjumlah 1251 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 419 orang. Jumlah Santri 2.375 orang.

9. Pondok Pesantren Al-Mizan Kabupaten Kuningan

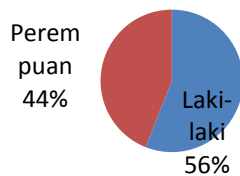
Pondok Pesantren Al-Mizan, NSPP 510032100075 berdiri pada tahun 1998. Pondok Pesantren Al-Mizan beralamat di Jl. Raya Timur No.01 RT 01 RW 10 Desa Cibolerang, Jatiwangi, Kabuapten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Jumlah santri di Pesantren Al-Mizan adalah 325, dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 150 orang dan santri

perempuan berjumlah 175 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 30 orang. Jumlah Santri 325 orang.

PROFIL PENGELOLA PONDOK PESANTREN

Gambaran responden berdasarkan Jenis Kelamin.

Berikut adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

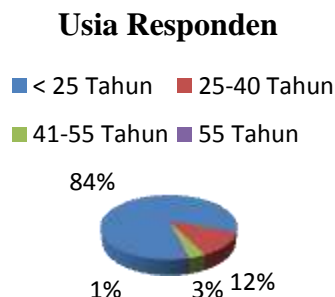


Gambar 4.1
Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 168 orang responden dengan persentase sebesar 56%. Dan perempuan sebanyak 132 orang responden dengan persentase 44%. Ini menunjukkan bahwa yang ada di pondok pesantren lokasi-lokasi penelitian di Wilayah III Cirebon lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Gambaran Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah gambaran karakteristik responden penelitian dari faktor usia.



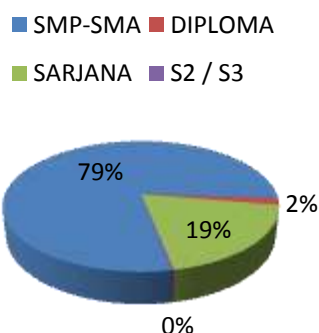
Gambar 4.2
Usia Responden

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden berusia kurang dari 25 tahun yaitu dengan persentase 84% atau dengan jumlah responden sebanyak 251 orang, sedangkan diposisi kedua untuk persentase Usia tertinggi yaitu berusia 25-40 tahun dengan persentase 12% atau dengan jumlah responden sekitar 37 orang responden dan selebihnya usia 41-55 tahun sebesar 3% dengan jumlah responden 10 orang dan sisanya yang berusia lebih dari 55 tahun hanya memiliki persentase 1% dengan jumlah responden 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan santri atau santriwati yang sedang sekolah menengah atau menempuh pendidikan tinggi.

Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah gambaran umum karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Pendidikan Terakhir



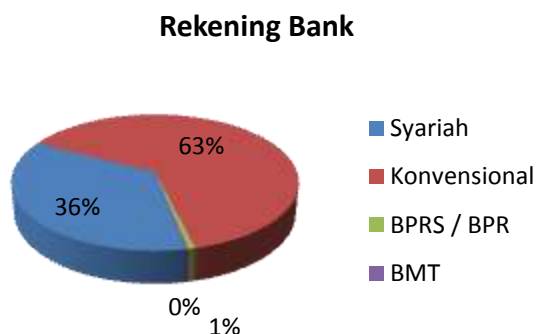
Gambar 4.3
Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan gambar 4.3 diatas terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan SMP – SMA yaitu sebesar 79% atau sebanyak 234 responden, kemudian persentase terbesar kedua adalah responden yang berlatar belakang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 57 orang responden atau jika persentase sebesar 19%. Dan untuk persentase selanjutnya ditempati oleh responden yang berpendidikan Diploma yaitu sebesar 2% atau sekitar 5 orang responden. Dengan demikian, gambaran ini menunjukkan bahwa responden sebagian besar adalah yang sedang menempuh pendidikan, baik itu

sekolah menengah maupun yang sedang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini juga menunjukkan adanya kesesuaian hasil dengan karakteristik sebelumnya dimana usia responden didominasi oleh usia <25 tahun.

Gambaran Responden Rekening Bank Responden

Berikut adalah gambaran karakteristik responden dari faktor rekening Bank yang dimiliki oleh responden saat ini.



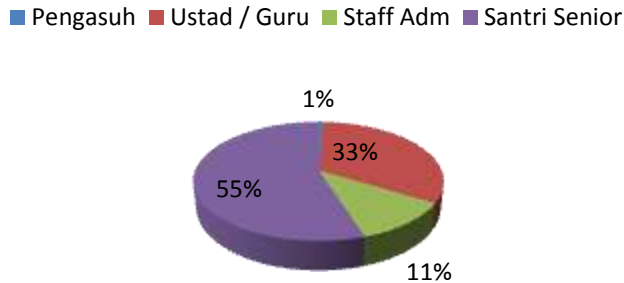
Gambar 4.4
Rekening Bank Responden

Berdasarkan gambar 4.4 diatas terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini masih menggunakan rekening bank konvensional dengan persentase 63%, kemudian untuk penggunaan rekening bank syariah hanya sebesar 36%, untuk penggunaan rekening BPR/BPRS hanya sekitar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa bank konvensional masih mendominasi pemikiran responden bahkan walaupun responden tersebut merupakan orang pondok pesantren yang notabene dianggap lebih memahami hukum syariah dalam pengelolaan keuangan, dibandingkan masyarakat umum.

Gambaran Responden Berdasarkan Profesi.

Berikut adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan profesi saat ini.

Profesi Responden



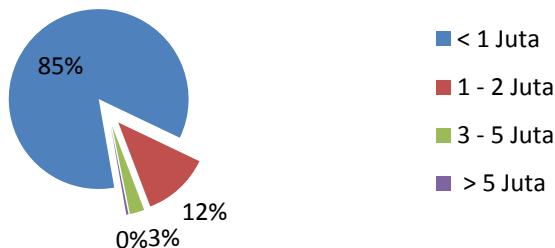
Gambar 4.5
Profesi Responden

Berdasarkan gambar 4.5 diatas terlihat bahwa profesi responden dalam penelitian ini didominasi oleh Santri senior dengan persentase sebesar 55%, posisi persentase terbesar kedua yaitu guru atau ustadz dengan persentase 33% selanjutnya untuk staff administrasi sebesar 11% dan sisanya 1 % yaitu pengasuh pondok pesantren. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil pada gambaran karakteristik responden dari faktor usia dan pendidikan terakhir. Santri senior biasanya yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan sekolah menengah atas, dimana mereka juga banyak yang membantu pengasuh pondok dalam beberapa kegiatan di dalam pesantren.

Gambaran Responden Berdasarkan Pendapatan.

Berikut adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan pendapatan saat ini.

Pendapatan Responden



Gambar 4.6
Pendapatan Responden

Berdasarkan gambar 4.6 diatas terlihat bahwa pendapatan responden dengan pendapatan perbulan < 1 Juta memiliki persentase sebanyak 85%, selanjutnya pendapatan responden perbulan 1 – 2 Juta rupiah memiliki persentase 12 % dan sisanya responden yang memiliki pendapatan perbulan sebesar 3 – 5 Juta hanya memiliki persentase 3 %. Hal ini dikarenakan para responden sebagian besar adalah santri senior yang masih menempuh pendidikan tinggi dan sekolah menengah.

Gambaran Responden Berdasarkan Pengeluaran.

Berikut adalah gambaran dari karekteristik responden berdasarkan pengeluaran rutin rata-rata perbulan.



Gambar 4.7
Pengeluaran Responden

Berdasarkan gambar 4.7 diatas terlihat bahwa pengeluaran responden dengan jumlah pengeliaran perbulan < 1 Juta memiliki persentase sebanyak 86%, selanjutnya pengeluaran responden perbulan 1 – 2 Juta rupiah memiliki persentase 12 % dan sisanya responden yang memiliki pengeluaran perbulan sebesar 3 – 5 Juta hanya memiliki persentase 2 %. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pengeluaran yang sama besar dengan pendapatan yang mereka miliki setiap bulan, dan ada juga yang lebih kecil pengeluaran perbulannya dibandingkan dengan pendapatannya setiap bulan.

Gambaran Responden Berdasarkan Lokasi

Berikut adalah gambaran umum karakteristik responden mengenai lokasi pesantren tempat responden berada.

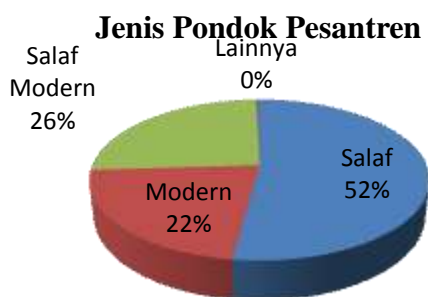


Gambar 4.8
Lokasi Pondok Pesantren

Berdasarkan gambar 4.8 diatas terlihat bahwa untuk lokasi pondok pesantren dalam penelitian ini Pondok Pesantren di Cirebon dengan persentase sebesar 46%, Pondok Pesantren di Indramayu dengan persentase sebesar 23%,Pondok Pesantren di Kuningan dengan persentase sebesar 20% dan Pondok Pesantren di Majalengka dengan persentase sebesar 11%. Hal ini sesuai dengan sebaran jumlah responden dan pondok pesantren yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya berdasarkan hitungan proposisi jumlah sampel penelitian.

Jenis Pondok Pesantren

Berikut adalah gambaran umum karekteristik responden berdasarkan jenis pondok pesantrennya.



Gambar 4.9
Jenis Pondok Pesantren

Berdasarkan gambar 4.9 diatas terlihat bahwa Jenis Pondok Pesantren ini tersebar di beberapa wilayah di Cirebon, Indramayu,

Majalengka, dan Kuningan. Untuk jenis pondok pesantren Salaf menduduki posisi persentase terbesar yaitu sebesar 52%, selanjutnya pondok salaf modern dengan persentase sebesar 26 % dan sisanya pondok pesantren modern dengan persentase 22%. Hal ini menunjukkan pada Wilayah III ini sebagian besar adalah pondok pesantren jenis Salaf.

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PONDOK PESANTREN

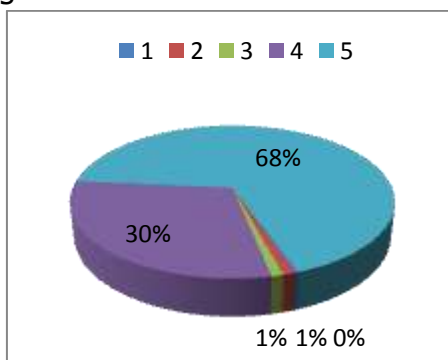
GAMBARAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PONDOK PESANTREN

Pemahaman dan perilaku pengelola pondok pesantren yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor Pengelolaan Keuangan Pribadi (PKP), Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah (PS), Asuransi Syariah (AS) dan Pasar Modal Syariah (PMS)

Persepsi Pengelola Pondok Pesantren Tentang Pengelolaan Keuangan Pribadi

1. Pengelolaan Keuangan Pribadi dengan baik untuk menghindari mudharat

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan dengan baik adalah penting, diantaranya memahami dan menghindari penggunaan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan banyak mudharatnya. Berikut adalah gambaran tentang pemahaman pengelola pondok pesantren terkait dengan penggunaan keuangan dengan meninggalkan transaksi yang mengandung unsur mudharat.



Gambar 4.10

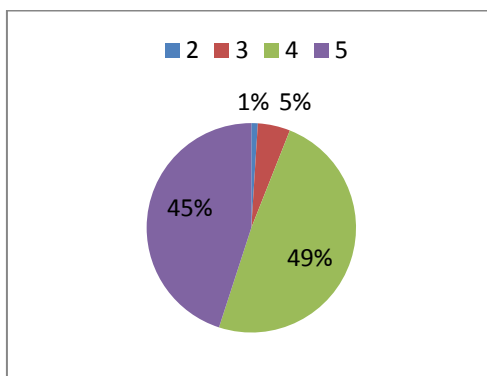
Pengelolaan Keuangan Pribadi Menghindari Mudharat

Berdasarkan gambar 4.10 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan pertama untuk variabel pengelolaan keuangan. Sebanyak 93% responden menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa para

responden memahami betul pentingnya mengelola keuangan dengan baik sebagai ikhtiar untuk menghindari kemudharatan.

2. Kepastian Produk yang dibeli Halal dan bermanfaat

Dalam melakukan transaksi pembelian produk diperlukan adanya kepastian bahwa barang atau jasa yang dibeli adalah kebutuhan bukan keinginan, halal dan memiliki manfaat. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang pembelian produk halal dan bermanfaat.



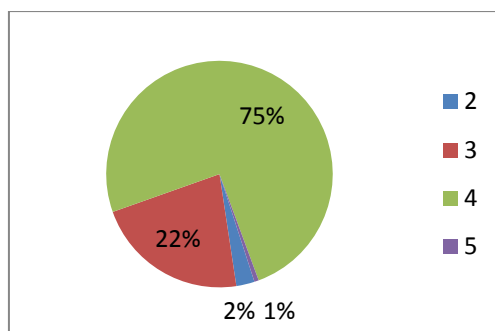
Gambar 4.11

Membeli Produk Halal dan Bermanfaat

Berdasarkan gambar 4.11 diatas terlihat bahwa PKP menunjukkan hasil bahwa 94% dari responden selalu memastikan kehalalan barang yang akan mereka beli setiap kali mereka akan membeli sebuah barang. Hal ini dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab dengan poin Setuju sebanyak 49% atau sekitar 147 orang responden, sedangkan untuk poin sangat setuju responden sebanyak 45% atau sekitar 135 orang responden.

3. Perencanaan Pengeluaran Keuangan

Dalam teori manajemen dikatakan bahwa perencanaan yang baik akan menentukan proses dan hasil. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan perencanaan yang matang sehingga terhindar dari pengeluaran yang mubazir. Gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang perencanaan pengeluaran keuangan sebagai berikut:

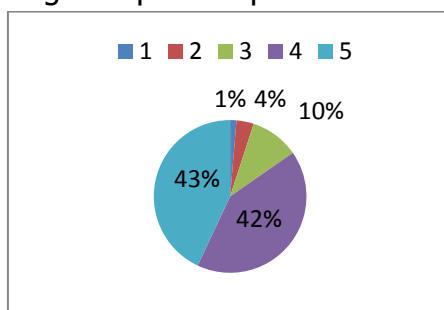


Gambar 4.12
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Pribadi

Berdasarkan gambar 4.12 diatas terlihat bahwa item ketiga untuk pengelolaan keuangan 97% dari responden menunjukkan sikap bahwa mereka selalu membuat perencanaan pengeluaran keuangan baik saecara harian, mingguan atau bulanan agar tidak terjadi pemborosan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 75% atau sekitar 143 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju 22% atau sekitar 110 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 2% atau sekitar 42 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab tidak setuju.

4. Perilaku Menabung

Menabung adalah salah satu pilihan portofolio aset yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga dan investasi. Pilihan penabungan bisa berupa tabungan atau deposito di bank sesuai dengan preferensinya. Berikut adalah gambaran tentang perilaku penabungan yang dimiliki para pengelola pondok pesantren.

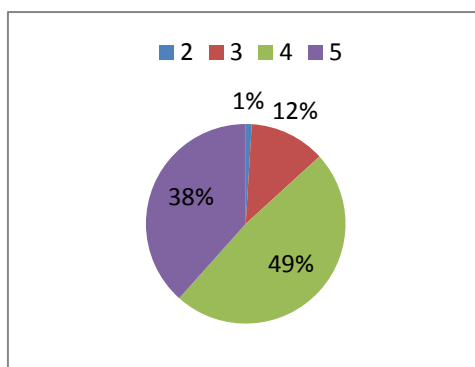


Gambar 4.13
Perilaku Menabung

Berdasarkan gambar 4.13 diatas terlihat bahwa nomer item pernyataan keempat untuk pengelolaan keuangan Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 42% atau sekitar 125 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju sebanyak 43% atau sekitar 129 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah menyadari pentingnya menabung disaat ada uang lebih setiap bulannya, dan tidak menghabiskannya untuk belanja.

5. Manajemen Keuangan

Ada pepatah yang mengatakan bahwa “jangan besar pasak daripada tiang”. Pepatah ini penting sekali untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Memanaj keuangan secara baik sangat penting agar terhindar dari krisis keuangan rumah tangga. Gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang pentingnya manajemen keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.14. Manajemen Keuangan

Berdasarkan gambar 4.14 diatas terlihat bahwa sebagian besar responden selalu mengupayakan besarnya pengeluaran mereka selalu sesuai dengan apa yang sudah mereka anggarkan, agar tidak terjadi pengeluaran diluar rencana yang mengakibatkan keborosan dalam pengeluaran.

Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 49% atau sekitar 150 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju sebesar 38% atau sekitar 119 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 12% atau sekitar 38 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab tidak setuju.

Tabel 4.1 Pengelolaan Keuangan Pribadi

No	Pengelolaan Keuangan Pribadi	Skor Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Memahami pengelolaan keuangan dengan baik adalah bagian dari ikhtiar untuk menghindari mudharat baik itu dalam penipuan maupun memakan harta yang tidak halal	204	89	3	3	1	4,64
2.	Saat akan melakukan belanja, saya selalu memastikan bahwa barang atau jasa yang saya beli adalah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga terhindar dari sifat mubazir.	135	147	15	3	0	4,38
3.	Saya terbiasa membuat rencana pengeluaran baik harian, mingguan maupun bulanan untuk menjaga agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak perlu.	110	143	42	5	0	4,19
4.	Ketika memiliki uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak, maka sebagian akan saya dimasukan ke rekening tabungan/ deposito daripada menghabiskan semuanya untuk berbelanja	129	125	31	11	4	4,21
5.	Pengeluaran yang saya lakukan akan selalu saya sesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulan, sehingga tidak terjadi besar pasak daripada tiang.	119	150	38	3	0	4,28

Hal terpenting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga adalah bagaimana pengelolaan keuangan pribadi. Dalam hal pengelolaan keuangan pribadi terdapat beberapa aspek yang menentukan dalam kesuksesan pengelolaan keuangan pribadi dan aspek-aspek itu adalah pemahaman tentang pengelolaan keuangan dengan baik, melakukan pembelajaran dengan memastikan bahwa produk yang dibeli adalah halal, membuat rencana keuangan dengan baik, menabung dan memanaj keuangan agar tidak terjadi defisit keuangan.

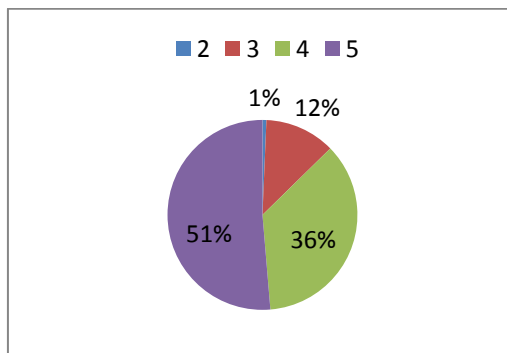
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan dengan nilai rata-rata terbesar yaitu "Memahami pengelolaan keuangan dengan baik adalah bagian dari ikhtiar untuk menghindari mudharat baik itu dalam penipuan maupun memakan harta yang tidak halal" sebesar 4.64 dan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu "Saya terbiasa membuat rencana pengeluaran baik harian, mingguan maupun bulanan

untuk menjaga agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak perlu.” sebesar 4.19. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan sehari-hari untuk menjaga kekurangan atau pengeluaran yang tidak perlu sudah baik. Walaupun nilainya terkecil tapi sudah diatas nilai 4 yang berarti dinilai sudah baik. Dengan demikian, para responden sudah memahami betul pentingnya pengelolaan keuangan, dan bahkan sudah menerapkannya dalam mengelola keuangan pribadi sehari-hari setiap bulannya.

PERSEPSI PENGELOLA PONDOK PESANTREN TENTANG KONSEP EKONOMI SYARIAH

1. Tujuan Utama Sistem Ekonomi Syariah

Pemahaman tentang sistem ekonomi syariah di kalangan pengelola pondok pesantren penting untuk diketahui. Pengelola pondok adalah sosok yang waktunya digunakan untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan termasuk tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu persepsi mereka tentang ekonomi Islam sangat penting untuk diketahui. Berikut adalah gambaran persepsi responden mengenai Ekonomi Syariah.



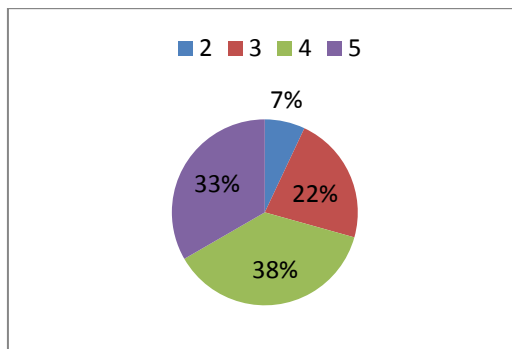
Gambar 4.15 Tujuan Utama Ekonomi Syariah

Berdasarkan gambar 4.15 diatas terlihat bahwa Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 36% atau sekitar 108 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju sebanyak 51% atau sekitar 154 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 12% atau sekitar 36 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakin bahwa tujuan

sistem ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahanan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

2. Sistem Keuangan Syariah berbeda dengan Keuangan Konvensional

Pemahaman para pengelola pondok pesantren tentang sistem keuangan syariah dan keuangan konvensional penting untuk diketahui. Anggapan bahwa sistem syariah dengan sistem konvensional tidak berbeda masih sering ditemukan di kalangan masyarakat. Berikut adalah gambaran tentang persepsi pengelola pondok pesantren tentang perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional.



Gambar 4.16

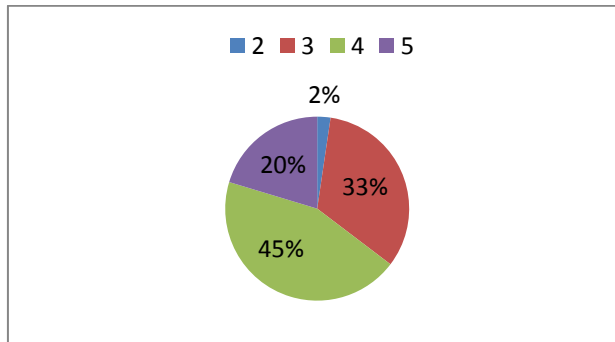
Perbedaan Keuangan Syariah dengan Konvensional

Berdasarkan gambar 4.16 di atas terlihat bahwa persepsi pengelola pondok pesantren tentang perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional menunjukkan bahwa 71% responden sudah meyakini bahwa sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dari jawaban Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 38% atau sekitar 112 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju sebesar 33% atau sekitar 100 orang responden.

3. Prinsip-Prinsip Dalam Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam keuangan syariah cukup beragam. Prinsip-prinsip tersebut berupa *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qard*, dan lainnya. Pemahaman akan

prinsip-prinsip keuangan syariah ini sangatlah penting bagi pengelola pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang prinsip-prinsip keuangan syariah.

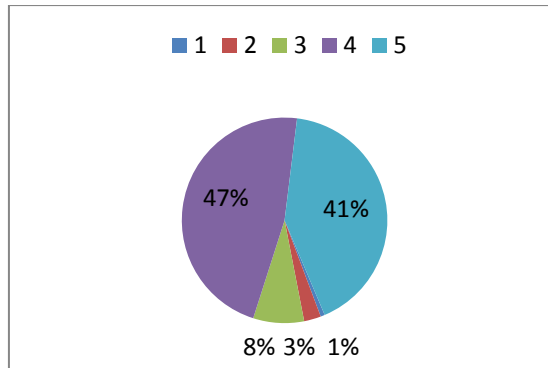


Gambar 4.17
Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Berdasarkan gambar 4.17 diatas terlihat bahwa Angket item pernyataan nomer 3 pada Ekonomi Syariah menunjukkan baru sekitar 65% saja dari responden yang memahami bahwa tidak hanya sistem *loss and profit sharing* saja yang diberlakukan pada ekonomi syariah. Masih ada sekitar 35% dari responden yang belum memahami sistem lain yang diberlakukan dalam ekonomi syariah. Karena masih cukup banyak yang menjawab ragu 33% atau sekitar 99 orang responden dan sisanya 2% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 7 orang responden.

4. Penyisihan Pendapatan Untuk Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi nisabnya. Kesadaran zakat merupakan salah satu tolok ukur kepekaan sosial umat Islam terhadap sesamanya. Berikut adalah gambaran tentang kesadaran zakat di kalangan pengelola pondok pesantren.

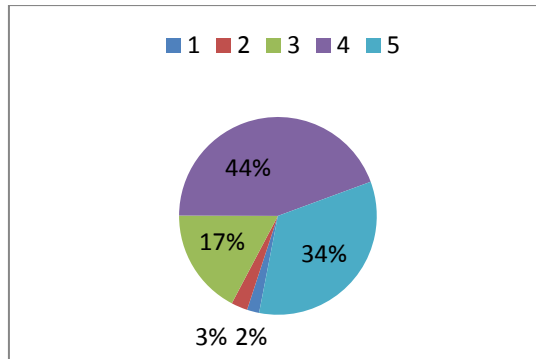


Gambar 4.18
Penyisihan Pendapatan Untuk zakat

Berdasarkan gambar 4.18 diatas terlihat bahwa pengelola pondok pesantren menjawab dengan Sangat Setuju sebanyak 41% atau sekitar 125 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 47% atau sekitar 141 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa 88% pengelola pondok pesantren sebagai responden selalu menyisihkan uangnya untuk berzakat sebagai investasi di akhirat dan menyisihkan untuk menabung sebagai bentuk investasi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan zakat sangat tinggi.

5. Keberkahan Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Salah satu yang membedakannya adalah keberkahan dan menentramkan hati. Akad yang jelas dan produk yang bebas dari unsur riba, gharar dan maisyir adalah salah satu alasan yang menentramkan hati. Berikut adalah gambaran dari persepsi pengelola pondok pesantren tentang sistem keuangan syariah yang memberi keberkahan dan menentramkan.



Gambar 4.19 Keberkahan Transaksi Keuangan Syariah

Berdasarkan gambar 4.19 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan kelima untuk Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju sebanyak 34% atau sekitar 101 orang responden, sedangkan untuk setuju sebanyak 44% atau sekitar 13 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 17% atau sekitar 52, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3% atau sekitar 8 orang responden dan sisanya 2% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 6 orang responden.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pengelola pondok pesantren sudah memiliki kesadaran dalam diri bahwa bertransaksi keuangan dengan menggunakan sistem keuangan syariah membuat hati mereka lebih tenang dan merasa lebih berkah, karena mereka percaya bahwa sistem keuangan syariah tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir yang diharamkan dalam syariat islam.

Secara umum gambaran tentang pemahaman terhadap ekonomi syariah bagi pengelola pondok pesantren dapat diperlihatkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pemahaman Ekonomi Syariah

No	Pemahaman Ekonomi Syariah	Skor Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Tujuan utama sistem ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan keberkahan umat manusia dunia dan akhirat	154	108	36	2	0	4,38
2.	Tidak seperti sistem keuangan konvensional, sistem keuangan syariah bebas dari unsur riba, gharar, maysir yang diharamkan.	100	112	67	21	0	3,97

3.	Dalam sistem keuangan syariah, prinsip yang digunakan tidak hanya berdasarkan pada bagi hasil atau <i>lost and profit sharing</i>	61	133	99	7	0	3,82
4.	Saya selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk berzakat dan menabung sebagai investasi dunia dan akhirat	125	141	24	8	2	4,26
5.	Saya percaya bahwa dengan menggunakan sistem keuangan syariah dalam setiap transaksi dilembaga keuangan syariah lebih berkah dan menenangkan hati.	101	133	52	8	6	4,05

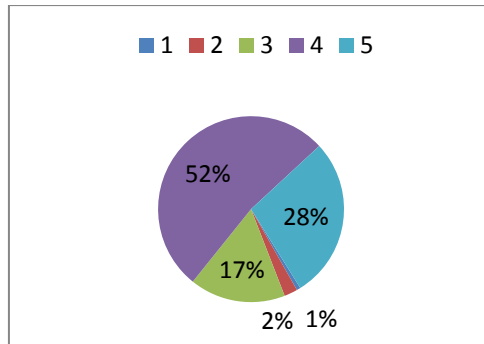
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan bahwa pemahaman tentang ekonomi syariah berdasarkan “Tujuan utama sistem ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan keberkahan umat manusia dunia dan akhirat” menunjukkan angka sebesar 4.38 dan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu “Dalam sistem keuangan syariah, prinsip yang digunakan tidak hanya berdasarkan pada bagi hasil atau *lost and profit sharing*.” sebesar 3,82. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengelola pondok pesantren terhadap sistem-sistem yang diberlakukan pada ekonomi syariah masih kurang tinggi, walaupun angkanya mendekati empat tapi masih banyak pengelola yang belum teredukasi mengenai sistem-sistem yang berlaku pada ekonomi syariah.

PERSEPSI PENGELOLA PONDOK PESANTREN TENTANG PERBANKAN SYARIAH

1. Produk-produk simpanan dan pembiayaan bank syariah

Praktik operasional bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk perbankan syariah yang dilakukan baik produk penghimpunan maupun pembiayaan menyesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu maka produk perbankan syariah sangat variatif menyesuaikan dengan akad yang dilakukan bisa berupa *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *qard*, dan lainnya.

Berikut adalah persepsi pengelola pondok pesantren tentang produk-produk perbankan syariah.

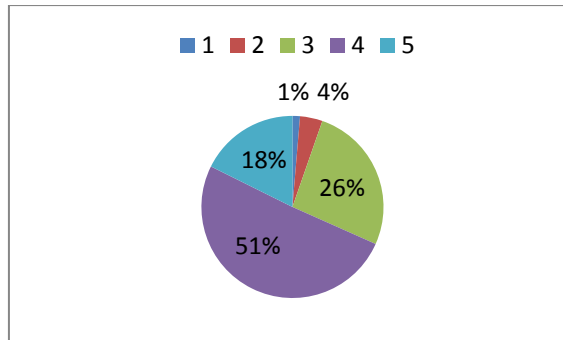


Gambar 4.20
Produk-produk Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 4.20 diatas dapat diinformasikan bahwa pengelola pondok pesantren sebagai responden memiliki literasi Perbankan Syariah yang cukup baik. Sejumlah 80% dari responden sudah mengetahui bahwa bank syariah memiliki berbagai produk dengan akad yang sesuai dengan kebutuhan responden. Hal ini ditunjukkan dari jawaban Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju sebanyak 28% atau sekitar 84 orang responden, sedangkan menjawab setuju responden sebesar 52% atau sekitar 157 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 17% atau sekitar 50 orang responden. Responden yang menjawab tidak setuju sebesar 2% atau sekitar 7 orang. dan sisanya 1% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 2 orang responden.

2. Produk Perbankan Syariah Kompetitif

Perbankan syariah memiliki varian produk yang beragam memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilih *return* yang diharapkan. Selain pilihan variasi produk yang berbeda juga memberi keuntungan yang cukup kompetitif. Pertimbangan inilah yang mempengaruhi keputusan bekerjasama dengan bank syariah. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang produk perbankan syariah.



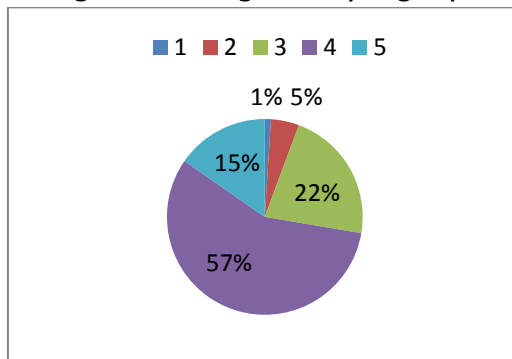
Gambar 4.21
Keuntungan Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 4.21 diatas terlihat bahwa pengelola pondok pesantren sebagai responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 51% atau sekitar 152 orang responden, 18% menjawab sangat setuju atau sekitar 53 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu 26% atau sekitar 79 orang responden. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 4% sebesar 12 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab sangat tidak setuju atau sekitar 4 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden memilih untuk menggunakan produk-produk dari bank syariah karena mereka memiliki keuntungan yang kompetitif, sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan jasa bank konvensional. Terlebih lagi mereka sudah memahami bahwa sistem syariah yang diterapkan bank syariah membawa ketenangan di dunia dan akhirat.

3. Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah

Salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam hal *return*. *Return* yang diperoleh dari bank konvensional adalah berupa bunga (*interest*) yang ditentukan diawal perjanjian sedangkan *return* yang diperoleh dari perbankan syariah bergantung dari akad yang dilakukan. *Return* yang diperoleh dari perbankan syariah jika menggunakan akad *mudharabah* adalah bagi hasil. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh disesuaikan dengan akad yang disepakati berdasarkan nisbah bagi hasil (persentase). Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bersifat fluktuatif sesuai

dengan produktivitas bank dalam mengelola dana nasabah. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren sebagai responden tentang nisbah bagi hasil yang diperoleh.



Gambar 4.22

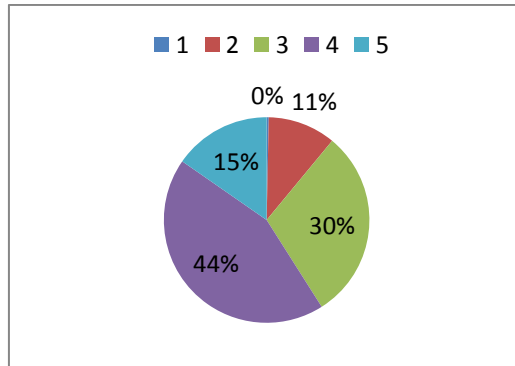
Nisbah Bagi hasil Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 4.22 diatas menunjukkan bahwa 72% pengelola pondok pesantren sebagai responden memahami betul bagi hasil yang akan mereka peroleh jumlahnya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa mereka memahami sistem *loss and profit sharing* yang dipegang oleh bank syariah. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban Responden yang menjawab dengan Setuju sebanyak 57% atau sekitar 171 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju responden sebanyak 15% atau sekitar 46 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu 22% atau sekitar 66 orang responden. Responden yang memilih tidak setuju sebesar 5% atau sekitar 14 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab sangat tidak setuju atau sekitar 3 orang responden.

4. Penggunaan Produk Jasa Simpanan dan Pembiayaan

Informasi tentang kebiasaan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah penting untuk diketahui. Kebiasaan menggunakan produk bank syariah menunjukkan bahwa nasabah bank tersebut sebagai loyalis nasabah bank syariah. Produk bank syariah yang digunakan dapat berupa produk penghimpunan berupa; giro, tabungan dan deposito juga bisa berupa produk pembiayaan; mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan qard. Berikut

adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang penggunaan produk jasa simpanan dan pembiayaan.

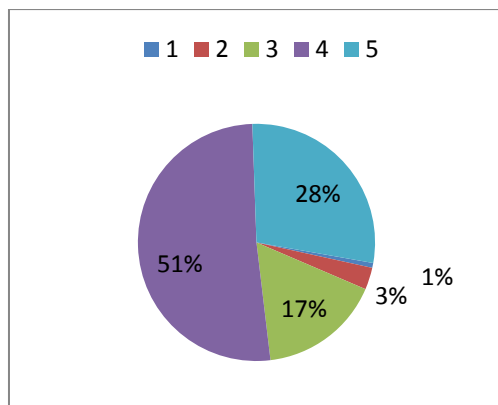


Gambar 4.23
Penggunaan Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan gambar 4.23 diatas terlihat bahwa Responden ketika ditanya tentang kebiasaan menggunakan produk perbankan syariah menjawab dengan Setuju sebanyak 44% atau sekitar 131 orang responden, sedangkan untuk sangat setuju responden sebanyak 15% atau sekitar 46 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu 30% atau sekitar 90 orang responden. Responden yang memilih tidak setuju sebesar 11% atau sekitar 32 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa baru 59% saja dari responden yang menggunakan jasa dan produk-produk dari bank syariah dalam kegiatan bertransaksi keuangan yang mereka lakukan sehari-hari.

5. Jaminan Kesesuaian Syariah Produk Bank Syariah

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan keputusan nasabah untuk bertransaksi di bank syariah adalah terpenuhinya kehalalan produk tersebut seperti yang disyaratkan oleh syar'i. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam menjaga kehalalan produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren sebagai responden tentang jaminan keseuaian syariah produk bank syariah.

**Gambar 4.24****Jaminan Kesesuaian Produk Bank Syariah**

Berdasarkan gambar 4.24 diatas dapat diinformasikan bahwa produk bank syariah sudah dijamin kesesuaian dengan syar'i seperti yang ditunjukkan oleh Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju sebanyak 28% atau sekitar 85 orang responden, yang menjawab setuju responden sebanyak 51% atau sekitar 154 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 17% atau sekitar 50 orang responden dan 3% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 9 orang responden. Sedangkan sisanya 1% responden memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan angket.

Hal ini menunjukkan bahwa 79% dari responden sudah yakin bahwa semua produk-produk bank syariah, baik pinjaman maupun simpanan sudah sah dan aman karena adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Secara umum gambaran tentang pemahaman terhadap perbankan syariah bagi pengelola pondok pesantren dapat diperlihatkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3**Persepsi tentang Perbankan Syariah**

No	Persepsi tentang Perbankan Syariah	Skor Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Bank syariah memiliki produk produk simpanan dan pembiayaan dengan prinsip dan akad yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan nasabah.	84	157	50	7	2	4,04

2.	Saya memilih menggunakan produk simpanan dan pembiayaan di perbankan syariah karena memberikan keuntungan yang lebih kompetitif.	53	152	79	12	4	3,79
3.	Bagi hasil yang akan saya dapatkan dari bank syariah bersifat fluktuatif atau tidak tetap karena menyesuaikan dari keuntungan yang didapatkan bank syariah.	46	171	66	14	3	3,81
4.	Saya selalu menggunakan produk dan jasa, simpanan dan pembiayaan di bank syariah untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.	46	131	90	32	1	3,63
5.	Semua produk simpanan dan pembiayaan di bank syariah sudah terjamin sah secara syariah karena telah melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	85	154	50	9	2	4,03

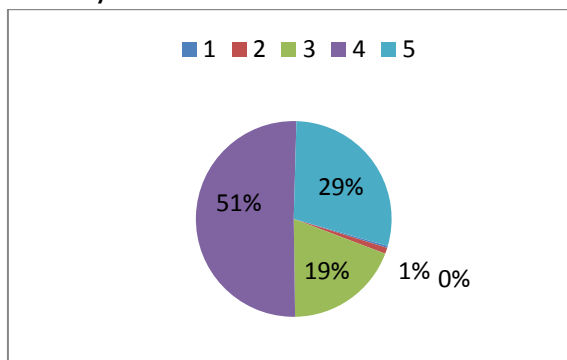
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata terbesar yaitu "Bank syariah memiliki produk produk simpanan dan pembiayaan dengan prinsip dan akad yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan nasabah." sebesar 4,04 dan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu "Saya selalu menggunakan produk dan jasa, simpanan dan pembiayaan di bank syariah untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari." sebesar 3,63.

Secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa pengelola pondok pesantren menilai jika bank syariah memiliki berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih banyak yang belum menggunakannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa dikarenakan lokasi bank syariah yang belum tersebar di berbagai daerah, dan masih adanya keterbatasan media pendukung bertransaksi melalui bank syariah seperti ATM, dimana hanya bisa digunakan di mesin ATM bersama atau ATM prima.

PERSEPSI PENGELOLA PONDOK PESANTREN TENTANG ASURANSI SYARIAH

1. Sistem Asuransi Syariah menggunakan prinsip takaful dan tabarru

Prinsip dasar yang dipakai dalam pelaksanaan asuransi syariah adalah saling menanggung (takaful) dan saling menolong (tabarru). Pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar asuransi syariah sangat penting agar dapat membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sehingga memberi keyakinan dan kenyamanan ketika bertransaksi dengan asuransi syariah. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren terhadap sistem asuransi syariah.



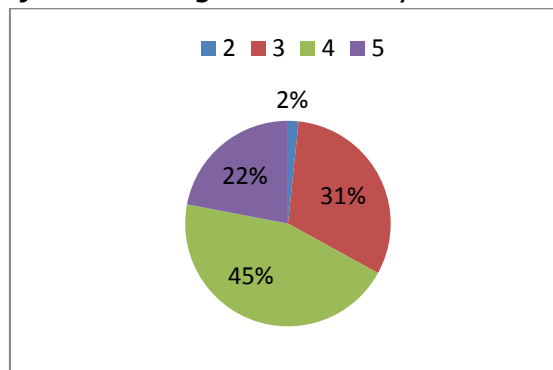
Gambar 4.25

Asuransi Syariah dengan prinsip takaful dan tabarru

Berdasarkan gambar 4.25 diatas terlihat bahwa pengelola pondok pesantren sebagai responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 29% atau sekitar 87 orang responden, sedangkan untuk setuju responden sebanyak 51% atau sekitar 152 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 19% atau sekitar 57 orang responden dan sisanya 1% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 3 orang responden. Dengan demikian, sekitar 80% responden memahami bahwa prinsip yang dianut oleh asuransi syariah adalah sistem saling menanggung dan saling menolong diantara sesama pemegang polis asuransi.

2. Pemahaman tentang produk, manfaat dan risiko Asuransi syariah

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi dengan asuransi syariah maka pemahaman tentang produk, manfaat dan risiko yang akan ditanggung perlu diketahui oleh nasabah. Pemahaman yang utuh tentang hal ini penting sekali agar terhindar dari ketidakjelasan. Transparansi adalah salah satu karakteristik dari sistem ekonomi Islam. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang produk, manfaat dan risiko yang akan dipeoleh ketika bekerja sama dengan asuransi syariah.



Gambar 4.26

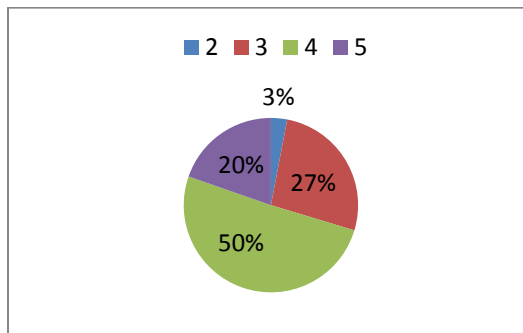
Produk, Manfaat dan Resiko Asuransi Syariah

Berdasarkan gambar 4.26 diatas terlihat bahwa baru 67% saja dari responden yang merasa bahwa harus memahami terlebih dahulu mengenai produk asuransi, manfaat, risiko, hak dan kewajiban pemegang polis sebelum memutuskan membeli polis asuransi. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban Responden yang menjawab Sangat Setuju hanya sebanyak 22% atau sekitar 66 orang responden, sedangkan untuk setuju sebanyak 45% atau sekitar 135 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 31% atau sekitar 94 orang responden dan 2% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 5 orang responden.

3. Premi Asuransi dikelola menjadi investasi dan dana Tabarru

Pengelolaan dana asuransi syariah menjadi perhatian nasabah. Portofolio yang diikuti bisa berupa investasi atau dana bersama

(tabarru). Pemahaman akan pengelolaan dana asuransi sangat penting untuk diketahui oleh nasabah, selain masalah kehalalan, transparansi akan penggunaan dana asuransi juga perlu dilakukan. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang pengelolaan dana asuransi menjadi investasi dan dana bersama.



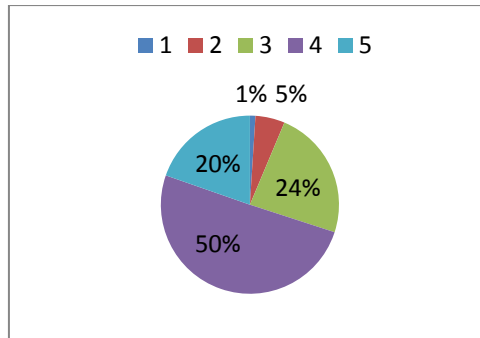
Gambar 4.27

Premi Asuransi dikelola menjadi Investasi dan *tabarru*

Berdasarkan gambar 4.27 diatas terlihat jumlah Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 20% atau sekitar 59 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 50% atau sekitar 152 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 27% atau sekitar 80 orang responden dan 3% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 9 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 70% saja responden yang memahami bahwa dari premi yang mereka bayarkan sebagian besar dikelola sebagai investasi dan sebagian kecil dimasukkan pada rekening dana bersama.

4. Ketepatan membayar Premi

Sumber dana bagi perusahaan asuransi adalah dari premi yang dibayarkan nasabah. Ketepatan membayar premi merupakan kesadaran nasabah itu sendiri. Keterlambatan dalam membayar premi berdampak pada keterlambatan dalam membayar klaim. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang pembayaran premi asuransi.

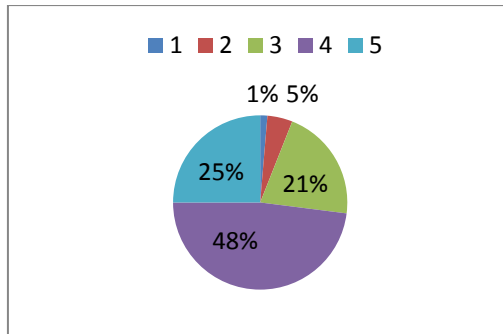


Gambar 4.28
Ketepatan Membayar Premi

Berdasarkan gambar 4.28 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan keempat pada Asuransi Syariah menunjukkan bahwa responden membayar premi asuransi tepat waktu sebelum jatuh tempo demi menghindari kesulitan klaim dikemudian hari. Hal ini bisa dilihat dari jawaban Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 20% atau sekitar 59 orang responden, menjawab setuju responden sebanyak 50% atau sekitar 151 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 24% atau sekitar 71 orang responden dan 5% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 16 orang responden. Sedangkan sisanya 1% responden memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan angket.

5. Kenyamanan asuransi syariah (halal dan klaim mudah)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli produk asuransi syariah adalah produk yang halal dan kemudahan dalam klaim. Faktor ini menjadi faktor pembeda dengan asuransi konvensional karena produk yang halal dan klaim yang mudah menjadi kenyamanan dan kepuasan tersendiri bagi nasabah. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang kenyamanan asuransi syariah.



Gambar 4.29
Kenyamanan Asuransi Syariah

Berdasarkan gambar 4.29 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan kelima pada Asuransi Syariah menunjukkan bahwa Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 25% atau sekitar 75 orang responden, sedangkan untuk setuju sebanyak 48% atau sekitar 144 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 21% atau sekitar 63 orang responden dan 5% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 14 orang responden. Sedangkan sisanya 1% responden memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan angket.

Dengan demikian, 73% dari responden merasa nyaman menggunakan produk asuransi syariah dikarenakan sudah jelas kepastian hukumnya dimana asuransi syariah memiliki produk yang halal untuk digunakan, selain itu proses klaim pun mudah dilakukan.

Secara umum gambaran tentang pemahaman terhadap asuransi syariah bagi pengelola pondok pesantren dapat diperlihatkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pemahaman tentang Asuransi Syariah

No	Pemahaman Asuransi Syariah	Skor Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Dalam sistem asuransi syariah, prinsip yang digunakan adalah prinsip saling menanggung (<i>takaful</i>) dan saling menolong (<i>tabarru</i>) diantara sesama pemegang polis.	87	152	57	3	1	4,07
2.	Sebelum memutuskan membeli polis asuransi, saya telah memahami dengan benar tentang						

	produk, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban atas polis asuransi yang akan saya ambil.	66	135	94	5	0	3,87
3.	Dalam asuransi syariah premi yang dibayarkan setiap bulan sebagian besar akan dikelola (investasi) dan sebagian lagi disisihkan dalam rekening dana bersama (tabarru)	59	152	80	9	0	3,87
4.	Saya membayar premi asuransi tepat waktu sebelum jatuh tempo untuk menghindari penolakan klaim dikemudian hari.	59	151	71	16	3	3,82
5.	Saya merasa lebih nyaman menggunakan asuransi syariah karena kepastian hukum (halal) dan klaim yang mudah.	75	144	63	14	4	3,90

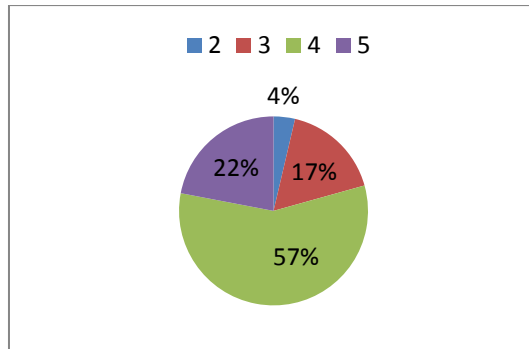
Berdasarkan hasil penelitian dapat diinformasikan bahwa hasil pernyataan dengan nilai rata-rata terbesar yaitu "Dalam sistem asuransi syariah, prinsip yang digunakan adalah prinsip saling menanggung (*takaful*) dan saling menolong (*tabarru*) diantara sesama pemegang polis." sebesar 4.07 dan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu "Dalam asuransi syariah premi yang dibayarkan setiap bulan sebagian besar akan dikelola (investasi) dan sebagian lagi disisihkan dalam rekening dana bersama (*tabarru*)" sebesar 3,87.

Dengan demikian, responden sudah memahami bagaimana sistem dan prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada asuransi syariah, namun masih kurang memahami bahwa sebagian premi yang dibayarkan akan dikelola dalam bentuk investasi dan sebagian lagi disisihkan dalam rekening dana bersama untuk memenuhi prinsip *tabarru*.

PERSEPSI PENGELOLA PONDOK PESANTREN TENTANG PASAR MODAL SYARIAH

1. Pemahaman tentang Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan investasi bisa berupa instrumen saham atau obligasi. Berikut adalah persepsi pengelola pondok pesantren tentang Pasar Modal Syariah (PMS).

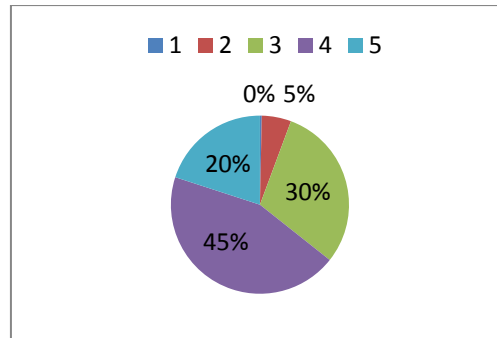


Gambar 4.30
Pasar Modal Syariah

Berdasarkan gambar 4.30 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan pertama pada Pasar Modal Syariah, Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 22% atau sekitar 66 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 57% atau sekitar 172 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 17% atau sekitar 51 orang responden dan 4% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 11 orang responden. Bisa dikatakan sekitar 79% dari responden sudah memahami pengertian pasar modal, bahwa pasar modal syariah adalah tempat terjadinya transaksi saham dan atau obligasi diantara investor dengan perusahaan baik pemerintah maupun swasta.

2. Pilihan Investasi Saham dan Obligasi Syariah

Pilihan portofolio aset di pasar modal bisa berupa saham dan obligasi syariah. Pilihan investasi di pasar modal sangat beragam termasuk juga ada saham dan obligasi non syariah. Bagaimana persepsi pengelola pondok pesantren tentang saham dan obligasi syariah dapat dilihat dari tabel berikut.



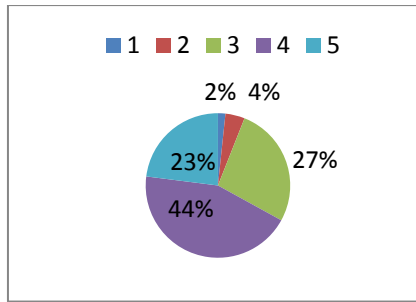
Gambar 4.31

Investasi Saham dan Obligasi di Pasar Modal Syariah

Berdasarkan gambar 4.31 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan kedua pada Pasar Modal Syariah, hanya sebesar 65% responden jika harus melakukan investasi pada jenis saham atau obligasi mereka akan memilih yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 20% atau sekitar 60 orang responden, sedangkan untuk setuju sebanyak 45% atau sekitar 133 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 30% atau sekitar 90 orang responden dan 5% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 16 orang responden.

3. Manfaat dan Resiko Investasi di Pasar Modal Syariah

Dalam teori investasi dikatakan bahwa '*no risk no return*', artinya bahwa ketika melakukan investasi pada portofolio apapun akan memperoleh manfaat dan risiko. Ketika berinvestasi akan memperoleh return berupa keuntungan dan akan memperoleh risiko berupa kerugian (*loss or gain*). Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang keuntungan dan kerugian investasi di pasar modal.

**Gambar 4.32**

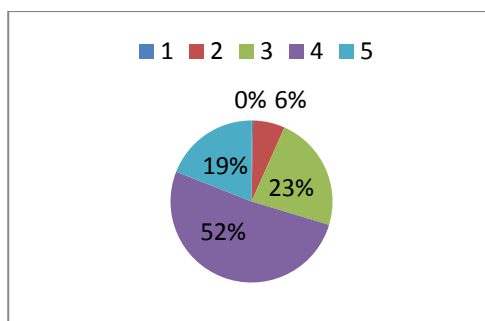
Manfaat dan Resiko Investasi di Pasar Modal Syariah

Berdasarkan gambar 4.32 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan Risiko investasi di Pasar Modal Syariah memperlihatkan Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 23% atau sekitar 69 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 44% atau sekitar 132 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 27% atau sekitar 81 orang responden dan 4% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 13 orang responden. Dan sisanya responden tidak setuju dengan pernyataan sebanyak 2% atau sekitar 5 responden.

Dengan demikian, hanya sekitar 67% saja dari responden yang memahami bahwa saat bermain di dalam pasar modal syariah, imbal hasil yang tinggi tentunya diiringi juga dengan tingkat risiko yang tinggi sama seperti halnya pada instrumen keuangan atau pasar modal konvensional.

4. Pilihan Investasi di Pasar Modal Syariah

Berinvestasi adalah sebuah pilihan portofolio dari setiap orang dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa ditunda-tunda bagi sebagian orang yang sudah kelebihan dana. Pilihan investasi di pasar modal syariah merupakan pilihan investasi yang tetap menjaga kehalalan dalam berinvestasi. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang pilihan investasi di pasar modal syariah.



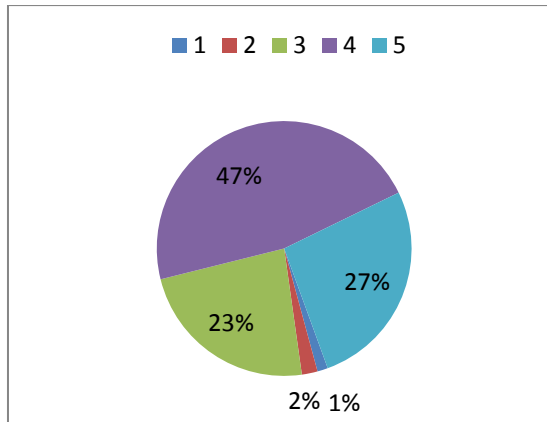
Gambar 4.33

Pilihan Investasi di Pasar Modal Syariah

Berdasarkan gambar 4.33 diatas terlihat bahwa pilihan investasi di Pasar Modal Syariah Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 19% atau sekitar 57 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 52% atau sekitar 154 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 23% atau sekitar 69 orang responden dan 6% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 19 orang responden. Hal ini menunjukkan bahwa 71% responden sudah menyisihkan sebagian pendapatan mereka setiap bulan untuk berinvestasi pada instrument keuangan syariah.

5. Investasi Syariah Halal dan Menguntungkan

Kehalalan dan keuntungan investasi di pasar modal syariah merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan investasi. Kejelasan status halal produk investasi dan keuntungan yang diperoleh menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Berikut adalah gambaran persepsi pengelola pondok pesantren tentang investasi halal dan menguntungkan di pasar modal syariah.

**Gambar 4.34****Investasi Halal dan Menguntungkan**

Berdasarkan gambar 4.34 diatas terlihat bahwa Angket pernyataan terakhir pada Pasar Modal Syariah menunjukkan bahwa Responden yang menjawab dengan Sangat Setuju hanya sebanyak 27% atau sekitar 80 orang responden, sedangkan untuk setuju responden menjawab 47% atau sekitar 140 orang responden, untuk responden yang menjawab ragu hanya 23% atau sekitar 70 orang responden dan 2% responden menjawab tidak setuju atau sekitar 6 orang responden dan sisanya 1% responden memilih menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan angket atau sebanyak 4 orang responden. Dengan demikian 74% saja dari responden yang sudah memahami bahwa berinvestasi pada instrument keuangan syariah di pasar modal syariah sudah pasti kehalalannya dan tentunya lebih menguntungkan. 26% sisanya masih belum teredukasi dengan baik mengenai pasar modal syariah.

Gambaran tentang pemahaman terhadap pasar modal syariah bagi pengelola pondok pesantren dapat diperlihatkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pemahaman Pasar Modal Syariah

No	Pemahaman Pasar Modal Syariah	Skor Jawaban					Rata-rata
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi antara investor dengan perusahaan (emiten) baik pemerintah maupun swasta atas instrumen keuangan seperti saham dan obligasi.	66	172	51	11	0	3,97
2.	Saya memilih untuk melakukan investasi pada jenis saham atau obligasi yang menggunakan prinsip syariah	60	133	90	16	1	3,78
3.	Sama dengan instrumen keuangan konvensional, saham dan obligasi syariah yang memiliki imbal hasil yang tinggi, juga memiliki resiko yang tinggi pula	69	132	81	13	5	3,82
4.	Saya selalu menyisihkan sebagian dari pendapatan saya setiap bulan untuk berinvestasi pada instrumen keuangan syariah	57	154	69	19	1	3,82
5.	Berinvestasi pada keuangan syariah lebih menguntungkan dan pasti kehalalannya.	80	140	70	6	4	3,95

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa hasil pernyataan dengan nilai rata-rata terbesar yaitu "Pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi antara investor dengan perusahaan (emiten) baik pemerintah maupun swasta atas instrumen keuangan seperti saham dan obligasi." sebesar 3,97 dan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu "Saya memilih untuk melakukan investasi pada jenis saham atau obligasi yang menggunakan prinsip syariah." sebesar 3,78.

TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI

TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PONDOK PESANTREN

Literasi keuangan syariah pengelola pondok pesantren diukur dengan memperhatikan aspek pengetahuan (*knowledge*), Perilaku (*behaviour*) dan sikap (*attitude*). Analisis literasi keuangan dengan memfokuskan pada pengelolaan keuangan pribadi, pemahaman tentang ekonomi syariah, pemahaman tentang perbankan syariah, pemahaman tentang asuransi syariah dan pemahaman tentang pasar modal syariah.

Literasi pengelolaan keuangan pribadi diukur dengan beberapa indikator-indikator yang meliputi aspek; pengelolaan keuangan pribadi dengan baik untuk menghindari mudharat, kepastian produk yang dibeli halal dan bermanfaat, perencanaan keuangan, perilaku menabung dan manajemen keuangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola pondok pesantren sudah memiliki pengetahuan perencanaan keuangan pribadi. Mereka mampu mengelola keuangan sehari-hari secara baik dan menghindari transaksi yang tidak perlu. Berdasarkan hasil penelitian literasi perencanaan keuangan memperoleh skor terkecil tetapi walaupun demikian sudah diatas nilai 4 yang berarti dinilai sudah baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pengelola pondok pesantren sudah memahami betul pentingnya pengelolaan keuangan, dan bahkan sudah menerapkannya dalam mengelola keuangan pribadi sehari-hari setiap bulannya. Jika diukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dapat disimpulkan bahwa para pengelola pondok pesantren dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan pribadi masuk pada kategori literasi yang baik (*well literate*).

Literasi tentang konsep ekonomi syariah diukur dengan beberapa indikator-indikator yang meliputi aspek; tujuan utama sistem ekonomi syariah, sistem keuangan syariah berbeda dengan keuangan konvensional, prinsip dalam keuangan syariah, penyisihan pendapatan untuk bayar zakat, dan keberkahan sistem keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diinformasikan bahwa bahwa pemahaman para pengelola pondok pesantren tentang sistem-sistem yang diberlakukan pada ekonomi syariah masih kurang tinggi, walaupun angkanya mendekati empat tapi masih banyak responden yang belum teredukasi mengenai sistem-sistem yang berlaku pada ekonomi syariah. Secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa para pengelola pondok pesantren dalam hal pemahaman tentang konsep ekonomi syariah masuk dalam kategori literasi yang cukup (*sufficient literate*).

Literasi para pengelola pondok pesantren tentang perbankan syariah diukur dengan beberapa indikator yang meliputi aspek: produk-produk simpanan dan pembiayaan bank syariah, produk perbankan syariah kompetitif, nisbah bagi hasil bank syariah, penggunaan produk jasa simpanan dan pembiayaan dan jaminan kesesuaian syariah produk bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan para pengelola pondok pesantren memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan syariah. Responden cukup paham tentang bank syariah yang memiliki berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun mereka belum inklusif, masih banyak yang belum menggunakannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa dikarenakan oleh banyak hal diantaranya adalah lokasi bank syariah yang belum tersebar di berbagai daerah, dan masih adanya keterbatasan media pendukung bertransaksi melalui bank syariah seperti ATM, dimana hanya bisa digunakan di mesin ATM bersama atau ATM prima. Secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa para pengelola pondok pesantren dalam hal pemahaman tentang perbankan syariah masuk dalam kategori literasi yang cukup (*sufficient literate*).

Sedangkan literasi para pengelola pondok pesantren tentang asuransi syariah diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi aspek; sistem akuntansi syariah menggunakan prinsip takaful dan tabarru, pemahaman tentang produk, manfaat dan risiko asuransi syariah, premi asuransi syariah dikelola menjadi investasi dan dana tabarru, ketepatan membayar premi dan kenyamanan asuransi syariah dengan klaim mudah serta halal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata para pengelola pondok pesantren memiliki pengetahuan yang rendah tentang asuransi syariah. Sebagian para pengelola pondok pesantren sudah memahami bagaimana sistem dan prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada asuransi syariah, namun masih kurang memahami bahwa sebagian premi yang dibayarkan akan dikelola dalam bentuk investasi dan sebagian lagi disisihkan dalam rekening dana bersama untuk memenuhi prinsip *tabarru* atau prinsip saling menolong antar sesama pemegang polis asuransi syariah. Secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa para pengelola pondok pesantren dalam hal pemahaman tentang perbankan syariah masuk dalam kategori literasi yang rendah (*less literate*).

Literasi para pengelola pondok pesantren tentang pasar modal syariah diukur dengan beberapa indikator yang meliputi aspek: pemahaman tentang pasar modal syariah, pilihan investasi saham dan obligasi syariah, manfaat dan risiko investasi di pasar modal syariah, pilihan investasi di pasar modal syariah dan investasi di pasar modal halal dan menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata para pengelola pondok pesantren memiliki pengetahuan yang rendah tentang pasar modal syariah. Belum semua pengelola pondok pesantren memiliki literasi yang baik mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar yang menawarkan produk keuangan syariah khususnya investasi keuangan syariah yang unik yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan saat “bermain” di dalamnya, dimana tidak semua orang mau melakukannya. Secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa para pengelola pondok pesantren belum memahami tentang pasar modal syariah dan jika diukur tingkat literasinya masuk dalam kategori literasi yang rendah (*less literate*).

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren Wilayah III Cirebon

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para pengelola pondok pesantren dapat dianalisis secara kuantitatif

seberapa besar pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren. Literasi keuangan syariah dibagi ke dalam dua bagian berupa literasi terhadap pengelolaan keuangan pribadi dan literasi terhadap konsep ekonomi Islam. Sedangkan preferensi keuangan syariah dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu preferensi terhadap bank syariah, preferensi terhadap asuransi syariah dan preferensi terhadap pasar modal syariah.

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Dari hasil pengolahan data yang menggunakan aplikasi IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) Versi 22, maka dapat diketahui hasil uji validitas setiap variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan (X_1)
Kriteria ($n-2$) = (300 – 2) = 298 r_{Tabel} = 0,113

Nomor Item	rHitung	RTabel	Keterangan
P1	0,380	0,113	Valid
P2	0,486	0,113	Valid
P3	0,620	0,113	Valid
P4	0,637	0,113	Valid
P5	0,494	0,113	Valid

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya dari semua pernyataan untuk variabel Literasi Keuangan adalah valid maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel penelitian Pengelolaan Keuangan Pribadi valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Ekonomi Syariah (X_2)
Kriteria ($n-2$) = (300 – 2) = 298 r_{Tabel} = 0,113

Nomor Item	RHitung	rTabel	Keterangan
P6	0,639	0,113	Valid
P7	0,716	0,113	Valid

P8	0,636	0,113	Valid
P9	0,488	0,113	Valid
P10	0,651	0,113	Valid

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya dari semua pernyataan untuk variabel Ekonomi Syariah adalah valid maka dapat disimpulkan bahwa semua perntaaan instrumen variabel penelitian Ekonomi Syariah valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Perbankan Syariah (Y_1)

Kriteria ($n-2$) = (300 – 2) = 298 r_{Tabel} = 0,113

Nomor Item	Rhitung	rTabel	Keterangan
P11	0,601	0,113	Valid
P12	0,622	0,113	Valid
P13	0,675	0,113	Valid
P14	0,684	0,113	Valid
P15	0,597	0,113	Valid

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya dari semua pernyataan untuk variabel Perbankan Syariah adalah valid maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel penelitian Perbankan Syariah valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Asuransi Syariah (Y_2)

Kriteria ($n-2$) = (300 – 2) = 298 r_{Tabel} = 0,113

Nomor Item	rHitung	RTabel	Keterangan
P16	0,587	0,113	Valid
P17	0,629	0,113	Valid
P18	0,672	0,113	Valid
P19	0,687	0,113	Valid
P20	0,710	0,113	Valid

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya dari semua pernyataan untuk variabel Asuransi Syariah adalah valid maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel penelitian Asuransi Syariah valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pasar Modal Syariah (Y_3)
Kriteria ($n-2$) = (300 – 2) = 298 r_{Tabel} = 0,113

Nomor Item	RHitung	RTabel	Keterangan
P21	0,631	0,113	Valid
P22	0,629	0,113	Valid
P23	0,594	0,113	Valid
P24	0,610	0,113	Valid
P25	0,513	0,113	Valid

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Artinya dari semua pernyataan untuk variabel Pasar Modal Syariah adalah valid maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen variabel penelitian Pasar Modal Syariah valid untuk dapat digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur yang digunakan berulang kali. Pengujian yang dipakai adalah dengan teori *Cronbach Alpha*. Suatu variabel yang dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Hasil pengujian ini menggunakan IBM SPSS versi 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Ketetapan	Keterangan
1	Pengelolaan Keuangan Pribadi (X_1)	0,751	0,60	Reliabel
2	Ekonomi Syariah (X_2)	0,780	0,60	Reliabel

3	Perbankan Syariah (Y_1)	0,785	0,60	Reliabel
4	Asuransi Syariah (Y_2)	0,788	0,60	Reliabel
5	Pasar Modal Syariah (Y_3)	0,772	0,60	Reliabel

(Sumber : Pengolahan data IBM SPSS Versi 22)

Berdasarkan data tabel diatas yang merupakan output hasil uji reliabilitas, untuk variabel Pengelolaan Keuangan Pribadi dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* 0,751 diatas ketetapan 0,60. Variabel Ekonomi Syariah dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* 0,780 diatas ketetapan 0,60. Untuk variabel Perbankan Syariah dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* 0,785 diatas ketetapan 0,60. Variabel Asuransi Syariah dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* 0,788 diatas ketetapan 0,60. Sedangkan untuk variabel Pasar Modal Syariah dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* 0,7725 diatas ketetapan 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas univariat terhadap masing-masing variabel, yaitu variabel literasi keuangan syariah dan variabel preferensi keuangan syariah. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas dapat menggunakan beberapa metode.

Uji normalitas dalam penelitian ini bisa dibuktikan dengan menggunakan alat uji analisis metode *Kolmogorov Smirnov*. Dengan kesimpulan apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti normal.

Tabel 4.12

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		300
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,37443773
	Most Extreme Differences Absolute	,037

	Positive	,031
	Negative	-,037
Test Statistic		,037
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample *Kolmogrov-Smirnov test*, dapat disimpulkan bahwa tingkat *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu 0,20, yang berarti tingkat signifikansi $> 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa data tersebar atau terdistribusi secara normal.

b. Uji Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh variabel Literasi Keuangan (pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah) terhadap Preferensi Keuangan Syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah) secara signifikan dan simultan.

Dimana :

X_1 adalah variabel pengelolaan keuangan pribadi

X_2 adalah variabel pemahaman ekonomi syariah

Y_1 adalah variabel preferensi perbankan syariah

Y_2 adalah variabel preferensi asuransi syariah

Y_3 adalah variabel preferensi pasar modal syariah

Tahapan perhitungan uji determinasi mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan pribadi (X_1), Pemahaman ekonomi Islam (X_2) dan Preferensi bank syariah (Y_1).
2. Pengelolaan keuangan pribadi (X_1), Pemahaman ekonomi Islam (X_2) dan Preferensi asuransi syariah (Y_1).
3. Pengelolaan keuangan pribadi (X_1), Pemahaman ekonomi Islam (X_2) dan Preferensi pasar modal syariah (Y_1).

Berikut adalah hasil perhitungan uji determinasi dari masing-masing variabel literasi terhadap variabel preferensi keuangan syariah:

Tabel 4.13
Uji Determinasi X_1 , X_2 dan Y_1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 ^a	,450	,447	2,17947

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai R adalah 0,671 yang menunjukkan terdapat hubungan sedang Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Perbankan Syariah. Karena nilai R berada pada interval bersifat sedang, yakni 0,5 sampai dengan 0,75.

Diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,450 atau (45%). Besarnya angka koefisien determinasi, 0,450 atau sama dengan 45%. Angka tersebut berarti menjelaskan bahwa sebesar 45% pengetahuan akan perbankan syariah dijelaskan dengan menggunakan variabel Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah sementara sisanya, yaitu 55% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.14
Uji Determinasi X_1 , X_2 dan Y_2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578 ^a	,335	,330	2,38194

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai R adalah 0,578 yang menunjukkan terdapat hubungan sedang Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Asuransi Syariah. Nilai R berada pada interval bersifat sedang, yakni 0,5 sampai dengan 0,75. Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,335 atau (33%). Besarnya angka koefisien determinasi, 0,335 atau

sama dengan 33%. Angka tersebut berarti menjelaskan bahwa sebesar 33% pengetahuan akan asuransi syariah dijelaskan dengan menggunakan variabel Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah sementara sisanya, yaitu 67% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.15
Uji Determinasi X_1 , X_2 dan Y_3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,540 ^a	,291	,287	2,38242

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui bahwa nilai R adalah 0,540 yang menunjukkan terdapat hubungan sedang Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Pasar Modal Syariah. Karena nilai R berada pada interval bersifat sedang, yakni 0,5 sampai dengan 0,75.

Menurut tabel 4.15, diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,291 atau (29%). Besarnya angka koefisien determinasi, 0,291 atau sama dengan 29%. Angka tersebut berarti menjelaskan bahwa sebesar 29% pengetahuan akan pasar modal syariah dijelaskan dengan menggunakan variabel Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah sementara sisanya, yaitu 71% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Pengujian Secara Individu (Parsial)

Tabel 4.16
Uji Secara Parsial X_1 , X_2 dan Y_1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,661	1,270		2,882	,004

X1	,134	,065	,103	2,066	,040
X2	,622	,050	,614	12,35 5	,000

a. Dependent Variable: Y1

Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau

Apabila nilai $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Apabila nilai $sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan output diatas diketahui t_{hitung} sebesar 2,066 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1)$, (α adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,066 > 1,971$. Diketahui pula, nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,040 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap Perbankan Syariah. Hasil ekonomi syariah terhadap perbankan syariah diketahui t_{hitung} sebesar 12,355 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1)$, (α adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,355 > 1,971$. Diketahui pula, nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ekonomi syariah berpengaruh terhadap Perbankan Syariah.

Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap Y_2

Tabel 4.17
Uji Secara Parsial X_1 , X_2 dan Y_2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,782	1,388		4,166	,000
X1	,146	,071	,112	2,050	,041
X2	,517	,055	,514	9,406	,000

a. Dependent Variable: Y_2

Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau

Apabila nilai sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Apabila nilai sig > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan output diatas diketahui t_{hitung} sebesar 2,050 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1)$, (α adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,050 > 1,971$. Diketahui pula, nilai sig < 0,05 yaitu $0,041 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pengelolaan Keuangan Pribadi berpengaruh terhadap Asuransi Syariah. Hasil ekonomi syariah terhadap asuransi syariah diketahui t_{hitung} sebesar 9,406 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (\alpha/2 ; n - k - 1)$, (α adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu

9,406 > 1,971. Diketahui pula, nilai $\text{sig} < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ekonomi syariah berpengaruh terhadap Asuransi Syariah.

Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap Y_3

Tabel 4.18
Uji Secara Parsial X_1 , X_2 dan Y_3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,757	1,388		4,868	,000
X1	,145	,071	,115	2,047	,042
X2	,461	,055	,473	8,380	,000

a. Dependent Variable: Y_3

Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan output diatas diketahui t_{hitung} sebesar 2,047 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (t_{\alpha/2 ; n - k - 1})$, (α adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,047 > 1,971$. Diketahui pula, nilai $\text{sig} < 0,05$ yaitu $0,042 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengelolaan keuangan pribadi berpengaruh terhadap Pasar Modal Syariah. Hasil ekonomi syariah terhadap pasar modal syariah

diketahui t_{hitung} sebesar 8,380 hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk menentukan t_{tabel} dengan menggunakan signifikansi 5%, yaitu $t_{tabel} = (a/2 ; n - k - 1)$, (a adalah nilai presisi atau signifikansi; n adalah jumlah sampel; dan k adalah jumlah variabel). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 1,971. Pada hasil analisis data diatas terlihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,380 > 1,971$. Diketahui pula, nilai $sig < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ekonomi syariah berpengaruh terhadap Pasar Modal Syariah.

d. Pengujian Bersama-sama (Uji F)

Pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y_1

Tabel 4.19

Uji Secara Simultan X_1 , X_2 dan Y_1

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1156,135	2	578,067	121,696	,000 ^b
Residual	1410,782	297	4,750		
Total	2566,917	299			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Kemudian dilakukan pengujian secara bersama-sama, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 Tidak ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Perbankan Syariah

H_a Terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Perbankan Syariah

Pada uji F, terdapat dua hipotesis, yakni H_0 yang bersifat negatif, dan H_a yang bersifat positif. Kesimpulan dalam uji F dihasilkan dengan memustuskan H_0 ditolak atau H_0 diterima. Ketika H_0 ditolak, maka H_a diterima, dan sebaliknya. Adapun Ketentuan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. < 0,05$

Ho diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. > 0,05$. Nilai F_{tabel} ditentukan dengan melihat F_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu $F_{tabel} = (k; n-1)$, (k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,41. Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F_{tabel} 2,41. Dari hasil tersebut diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $121,696 > 2,41$. Diketahui juga, nilai signifikansi untuk Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah secara bersama-sama terhadap Perbankan Syariah.

Pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y_2

Tabel 4.20
Uji Secara Simultan X_1 , X_2 dan Y_2
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	847,371	2	423,685	74,676	,000 ^b
Residual	1685,066	297	5,674		
Total	2532,437	299			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Kemudian dilakukan pengujian secara simultan, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 Tidak ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Asuransi Syariah

H_a Terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Asuransi Syariah

Pada uji F, terdapat dua hipotesis, yakni H_0 yang bersifat negatif, dan H_a yang bersifat positif. Kesimpulan dalam uji F dihasilkan dengan memutuskan H_0 ditolak atau H_0 diterima. Ketika H_0 ditolak, maka H_a diterima, dan sebaliknya. Adapun Ketentuan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. < 0,05$

H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. > 0,05$. Nilai F_{tabel} ditentukan dengan melihat F_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu $F_{tabel} = (k; n-1)$, (k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,41. Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai F_{tabel} 2,41. Dari hasil tersebut diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $74,676 > 2,41$. Diketahui juga, nilai signifikansi untuk Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah secara bersama-sama terhadap Asuransi Syariah.

Pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y_3

Tabel 4.21
Uji Secara Simultan X_1 , X_2 dan Y_3
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	693,372	2	346,686	61,080	,000 ^b
Residual	1685,748	297	5,676		
Total	2379,120	299			

a. Dependent Variable: Y_3

b. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Kemudian dilakukan pengujian secara simultan, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 Tidak ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Pasar Modal Syariah

H_a Terdapat pengaruh Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah terhadap Pasar Modal Syariah

Pada uji F, terdapat dua hipotesis, yakni H_0 yang bersifat negatif, dan H_a yang bersifat positif. Kesimpulan dalam uji F dihasilkan dengan memustuskan H_0 ditolak atau H_0 diterima. Ketika H_0 ditolak, maka H_a diterima, dan sebaliknya. Adapun Ketentuan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. < 0,05$

Ho diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau apabila nilai $Sig. > 0,05$

Nilai F_{tabel} ditentukan dengan melihat F_{tabel} pada signifikansi 5%, yaitu $F_{tabel} = (k; n-1)$, (k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai F_{tabel} sebesar 2,41.

Tabel 4.21, menunjukkan F_{tabel} 2,41. Dari hasil tersebut diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $61,080 > 2,41$. Dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Pribadi dan Ekonomi Syariah secara simultan terhadap Pasar Modal Syariah.

IMPLIKASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PESANTREN

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh informasi bahwabahwa literasi pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 45% terhadap preferensi akan perbankan syariah. Kondisi ini sejalan dengan hasil persepsi responden yang berkesimpulan bahwa literasi pengelola pondok pesantren berada pada kategori literasi yang baik (*well literate*) pada pengelolaan keuangan pribadi dan kategori literasi cukup (*sufficient literate*) pada ekonomi syariah, sehingga bank syariah memiliki peran dalam mengelola keuangan dan perekonomian responden, misalkan menyimpan uang, membayar pengeluaran rutin seperti PLN dan PDAM melalui bank syariag dan menggunakan ATM bank syariah saat melakukan tarnsaksi keuangan.

Selanjutnya hasil analisis statistik keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 33% terhadap preferensi akan asuransi syariah. Sejalan dengan pemahaman mereka mengenai asuransi syariah, masih sekitar 25% dari reponden yang menunjukkan kurangnya pemahaman mereka mengenai asuransi syariah sehingga keinginan untuk menggunakan polis asuransi tidak sebesar yang memiliki pemahaman mengenai asuransi syariah.

Sedangkan hasil analisis statistik tentang pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah menunjukkan pengaruh sebesar 29% terhadap preferensi akan pasar modal syariah. Sama seperti dengan asuransi syariah, responden pun berada pada kategori literasi yang rendah (*less literate*) dalam dunia pasar modal syariah. Kurangnya pemahaman mengenai pasar modal syariah membuat banyak responden yang tidak “bermain” di pasar modal, terlebih tidak semua orang tekun dan telaten memantau perkembangan naik dan turunnya instrumen dalam pasar modal syariah.

POLA LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PESANTREN

Tidak dapat disangkal bahwa setiap studi yang dilakukan akan membuahkan berbagai implikasi. Dalam bagian ini akan diuraikan implikasi-implikasi yang bersangkutan paut dengan perkembangan lembaga keuangansyariah.

a. Pola literasi pengelolaan keuangan keluarga

Jika dilihat dari data hasil penelitian yang tertera pada tabel 4.12 terlihat bahwa literasi pengelolaan keuangan keluarga pengelola pondok pesantren dapat dikatakan *baik* (*well literate*). Pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan keluarga ini menyebabkan mereka memiliki preferensi untuk bertransaksi atau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

Pengelolaan keuangan keluarga yang terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung mudharat menyebabkan mereka sangat berhati-hati ketika akan memutuskan transaksi di lembaga keuangan. Begitu juga informasi tentang kepastian produk yang dibeli adalah halal dan punya manfaat menjadi pertimbangan dalam memutuskan bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Aspek lain yang penting dalam pengelolaan keuangan adalah kemampuan dalam merencanakan pengeluaran keuangan. Kemampuan dalam merencanakan pengeluaran berdampak kepada pilihan mereka untuk melakukan penabungan atau investasi di lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, perilaku penyimpanan mereka dalam mengelola keuangannya baik masuk ke dalam portofolio tabungan atau tabungan akan menentukan pilihan portofolionya apakah masuk ke lembaga keuangan bank atau non bank.

Selain aspek-aspek penting di atas, kemampuan dalam memanaj keuangan tidak kalah pentingnya dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam mengelola aset keuangannya.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan dan program dari pemerintah yang masif ke masyarakat yaitu edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga, khususnya edukasi

pengelolaan keuangan keluarga di kalangan pengelola pondok pesantren.

b. Pola literasi ekonomi syariah.

Sampai dengan tahun 1992 masyarakat Indonesia belum banyak yang kenal dengan perbankan syariah atau pun ekonomi syariah. Momentum pembukaan Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 ternyata menjadi pendorong masyarakat untuk mencari tahu apa itu bank syariah? Dan apa itu ekonomi syariah? Seiring dengan perjalanan waktu kajian-kajian dan studi-studi ekonomi Islam, perbankan Islam dan lainnya bermunculan bahkan muncul program-program studi ekonomi Islam dan sejenis banyak bermunculan di perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat dari data yang tertera pada tabel 4.13 terlihat bahwa literasi pengelola pondok pesantren terhadap ekonomi Islam dapat dikatakan **cukup**. Pemahaman yang hanya **cukup** tentang ekonomi syariah sangatlah mengagetkan karena sebagai pengelola pendidikan di entitas pendidikan Islam (pesantren) dianggap ahli oleh sebagian masyarakat.

Walau literasi tentang ekonomi syariah hanya dikatakan cukup, tidak berarti mereka tidak memiliki preferensi untuk bertransaksi atau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

Pemahaman tentang ekonomi syariah yang terkait dengan tujuan sistem ekonomi syariah menyebabkan mereka sangat berhati-hati ketika akan memutuskan transaksi di lembaga keuangan. Begitu juga pemahaman tentang perbedaan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional menjadi faktor penting dalam memutuskan bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Aspek penting lain dalam konsep ekonomi syariah yang perlu diketahui adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dalam keuangan syariah. Kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dalam keuangan syariah berdampak kepada pilihan mereka ketika akan melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Perilaku keuangan mereka ketika menentukan pilihan portofolionya selain mempertimbangkan kewajiban membayar pajak

juga memperhatikan aspek keberkahan dalam bermuamalah. Aspek-aspek ini sangat penting dan menjadi bahan pertimbangan ketika menentukan pilihan-pilihan dalam mengelola aset portofolio keuangannya.

Implikasi dari temuan ini adalah perlu upaya yang berkesinambungan dalam mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah, khususnya edukasi prinsip-prinsip penting dalam bermuamalah semisal kejujuran, transparansi, bebas gharar, tidak ada spekulasi, dan tanpa riba di kalangan pengelola pondok pesantren. Pemahaman yang *kaffah* tentang prinsip ekonomi Islam akan berdampak pada perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank.

c. Pola literasi perbankan Syariah

Jika dilihat dari data hasil penelitian yang tertera pada tabel 4.14 terlihat bahwa literasi tentang perbankan syariah pengelola pondok pesantren dapat dikatakan **cukup** (*sufficient literate*). Pemahaman yang cukup tentang perbankan syariah ini mempengaruhi preferensi mereka untuk bertransaksi atau bekerja sama dengan perbankan syariah.

Pemahaman tentang produk-produk perbankan syariah berupa produk simpanan dan pembiayaan semisal produk *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dll cukup baik dan hal ini akan mempengaruhi mereka ketika akan memutuskan transaksi di perbankan syariah. Begitu juga informasi tentang kemampuan perbankan syariah dalam meluncurkan produknya mampu bersaing dengan perbankan konvensional baik dalam aspek pelayanan maupun *return*.

Aspek lain yang penting menyangkut pemahaman tentang perbankan syariah adalah *return* yang diperoleh berupa nisbah bagi hasil. Aspek ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika akan bertransaksi di bank syariah. Preferensi nasabah dalam melakukan transaksi di perbankan syariah juga dipengaruhi oleh ketersediaan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk-produk

tersebut bisa berupa produk penghimpunan maupun produk pembiayaan.

Selain aspek – aspek tadi yang menjadi pertimbangan responden dalam bertransaksi di bank syariah adalah kepastian atau jaminan kesesuaian produk-produk bank syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (maqasid syariah).

Implikasi dari temuan ini adalah perlu diadakannya edukasi yang lebih intensif dan efektif kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan optimalisasi peran dewan pengawas syariah yang ada di bank syariah agar aktivitas dan operasionalisasi bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tanpa mengesampingkan kreatifitas dan inovasi produk.

d. Pola literasi asuransi syariah

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tertera pada tabel 4.15 terlihat bahwa literasi tentang asuransi syariah pengelola pondok pesantren dapat dikatakan **rendah** (*less literate*). Pemahaman yang rendah tentang asuransi syariah ini mempengaruhi preferensi mereka untuk bertransaksi atau bekerja sama dengan asuransi syariah.

Pemahaman tentang produk-produk asuransi syariah berupa produk takaful dan tabarru belum terlalu dikenal. Kondisi ini mempengaruhi mereka ketika akan memutuskan membeli produk asuransi syariah. Begitu juga informasi tentang manfaat dan risiko produk belum begitu dipahami.

Aspek lain yang penting menyangkut pemahaman tentang pengelolaan dana asuransi dana tabarru. Aspek ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika akan bertransaksi di asuransi syariah. Preferensi nasabah dalam melakukan transaksi di asuransi syariah juga dipengaruhi oleh ketepatan asuransi syariah dalam membayar klaim nasabah.

Terakhir, aspek lainnya yang menjadi pertimbangan responden dalam bertransaksi di asuransi syariah adalah kenyamanan dan kepastian atau jaminan kesesuaian produk-produk

asuransi syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*maqashid syariah*).

Implikasi dari temuan ini adalah perlu diadakannya edukasi yang lebih intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya di kalangan pondok pesantren tentang asuransi syariah dan optimalisasi peran dewan pengawas syariah yang ada di asuransi syariah agar aktivitas dan operasionalisasi asuransi syariah tetap seuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tanpa mengesampingkan kreatifitas dan inovasi produk.

e. Pola literasi pasar modal syariah

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tertera pada tabel 4.16 terlihat bahwa literasi tentang pasar syariah pengelola pondok pesantren dapat dikatakan **rendah** (*less literate*). Pemahaman yang rendah tentang pasar modal syariah ini mempengaruhi preferensi mereka untuk bertransaksi atau bekerja sama dengan pasar modal syariah.

Pemahaman para pengelola pondok pesantren tentang portofolio pasar modal syariah masih rendah. Kondisi ini menjadi bahan pertimbangan mereka ketika akan memutuskan membeli surat berharga di pasar modal syariah. Karena pemahaman tentang pasar modal syariah rendah hal ini pun berdampak kepada pemahaman tentang pilihan investasi mereka di pasar modal. Informasi tentang manfaat dan risiko ketika investasi di pasar modal syariah yang masih rendah berkorelasi dengan pilihan-pilihan portofolio keuangan mereka.

Aspek lain yang penting adalah menyangkut pemahaman tentang pengelolaan dana investasi di pasar modal syariah. Aspek ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika akan berinvestasi di pasar modal syariah. Preferensi nasabah dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah juga dipengaruhi oleh produk-produk hybrid yang diluncurkan pasar modal syariah.

Terakhir, aspek lainnya yang menjadi pertimbangan responden dalam bertransaksi di pasar modal syariah adalah kenyamanan dan kepastian atau jaminan kesesuaian produk-produk

asuransi syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*maqashid syariah*). Implikasi dari temuan ini adalah perlu diadakannya edukasi yang lebih intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya di kalangan pondok pesantren tentang pasar modal syariah, produk-produk investasi yang diperjualbelikan, risiko investasi, dan optimalisasi peran DPS yang ada di pasar modal syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tanpa mengesampingkan kreatifitas dan inovasi produk menyesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan yang terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat masif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa:

1. Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pondok pesantren dilihat dari:
 - Pemahaman pengelolaan pengeluaran pribadi masuk pada kategori *well literate*.
 - Pemahaman ekonomi syariah masuk pada kategori *sufficient literate*
 - Pemahaman perbankan syariah Bisa dikatakan untuk literasi terhadap perbankan syariah masuk pada kategori *sufficient literate*
 - Pemahaman asuransi syariah asuransi syariah masuk pada kategori *less literate*
 - Pemahaman pasar modal syariah masuk pada kategori *less literate*.
2. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Preferensi di Kalangan Pondok Pesantren Wilayah III Cirebon sebagai berikut:
 - pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 45% terhadap preferensi akan perbankan syariah.
 - Sedangkan pengaruh variabel pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah terhadap preferensi akan asuransi syariah sebesar 33%.
 - pengaruh variabel pengelolaan keuangan pribadi dan ekonomi syariah berpengaruh sebesar 29% terhadap preferensi akan pasar modal syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pada variabel ekonomi syariah, pemahaman responden mengenai prinsip yang digunakan tidak hanya berdasarkan pada bagi hasil atau *losst and profit sharing* masih rendah, sehingga perlu dilakukan edukasi lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip lain yang digunakan dalam perekonomian syariah.
2. Pada variabel perbankan syariah penilaian paling kecil mengenai keseringan penggunaan produk dan jasa, simpanan dan pembiayaan di bank syariah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih sering kepada orang-orang di pondok pesantren se-wilayah III Cirebon.
3. Pada variabel asuransi syariah dan pasar modal syariah masuk pada kategori *less literate* dimana pemahaman mereka mengenai variabel ini sangat terbatas, sehingga perlu diberikan sosialisasi lebih intens mengenai asuransi syariah dan pasar modal syariah di berbagai pondok pesantren yang ada di Wilayah III Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Asta Zokaityte, Financial Literacy Education, Switzerland : Springer 2017

Atkinson, A. and Messy, F-A. (2012), "Measuring Financial Literacy: Results of the OECD INFE Pilot Study", OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing

Carmela Aprea et al, International Hand book of Financial Literacy, Siangapore : Springer 2016

Freddy Rangkuti. 2011. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Jay Liebowitz, Financial Literacy Education, CRC Press : New york 2016

Kaplan, Robert. S dan Dennis Sacuzzo. 1993. *Psycological Testing, Principles, Applications and Issues*. New Jersey: Brool Cole Publishing Company, a decision of Wadsworth Inc.

Kempson, E. (2009), "Framework for the Development of Financial Literacy Baseline Surveys: A First International Comparative Analysis", OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 1, OECD Publishing. doi: 10.1787/5kmddpz7m9zq-en

Manurung, Adler H dan Rizky, Lutfi T. 2009. *Succesful Financial Planner: A Complete Guide*. Jakarta : Grasindo.

Marlina, potensi pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah jurnal hukum islam (jhi) volume 12, nomor 1, juni 2014

Remund, David L. 2010. *Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy*. The Journal of ConsumerAffairs Vol.44 No.2.

Sandra J Houston, 2010, Measuring Financial Literacy, The Journal of Consumers Affairs Vol. 44 No 2 2010.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tina Harrison, Financial Literacy and the Limits of Financial Decision-Making, Springer : Switzerland, 2016

Uhar Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ulfatun, Titik, dkk. 2016. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014*. Jurnal Pelita Vol.XI No.2.

Widayati, Irin. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol 1. Madiun: IKIP PGRI Madiun.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi pengisian kuisioner di Pondok Pesantren Al-Mutawally Kab. Kuningan



Dokumentasi pengisian kuisisioner di Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka



Dokumentasi pengisian kuisisioner di Pondok Pesantren As-Sakienah Indramayu



Dokumentasi pengisian kuisioner di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon

Lampiran 2

1. Uji VALIDITAS DAN REALIABLITAS (PENGELOLAAN KEUANGAN)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	38,7800	17,838	,380	,748
P2	39,0400	17,156	,486	,731
P3	39,2267	15,922	,620	,702
P4	39,2067	15,034	,637	,688
P5	39,1367	16,908	,494	,728
Total	21,7100	5,023	1,000	,629

2. Uji VALIDITAS DAN REALIABLITAS (EKONOMI SYARIAH)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P6	36,6000	28,074	,639	,752
P7	37,0100	25,943	,716	,726
P8	37,1533	27,682	,636	,748
P9	36,7167	28,819	,488	,768
P10	36,9300	26,661	,651	,738
Total	20,4900	8,364	1,000	,750

3. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (PERBANKAN SYARIAH)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P11	34,5867	28,752	,601	,759
P12	34,8400	27,894	,662	,748
P13	34,8233	28,106	,675	,749
P14	35,0033	27,274	,684	,741
P15	34,5967	28,636	,597	,759
Total	19,3167	8,585	1,000	,769

4. UJI VALIDITAS DAN RELIABELITAS (ASURANSI SYARIAH)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P16	35,0167	28,679	,587	,767
P17	35,2133	28,182	,629	,760
P18	35,2167	27,956	,672	,755
P19	35,2633	27,151	,687	,747
P20	35,1800	26,717	,710	,741
Total	19,5433	8,470	1,000	,782

5. UJI VALIDITAS DAN RELIABELITAS (PASAR MODAL SYARIAH)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P21	34,7433	26,526	,631	,740
P22	34,9367	25,792	,629	,733
P23	34,8967	25,665	,594	,735
P24	34,8967	26,039	,610	,737
P25	34,7667	26,695	,513	,751
Total	19,3600	7,957	1,000	,715

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		300
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,37443773
Most Extreme Differences	Absolute	,037
	Positive	,031
	Negative	-,037
Test Statistic		,037
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

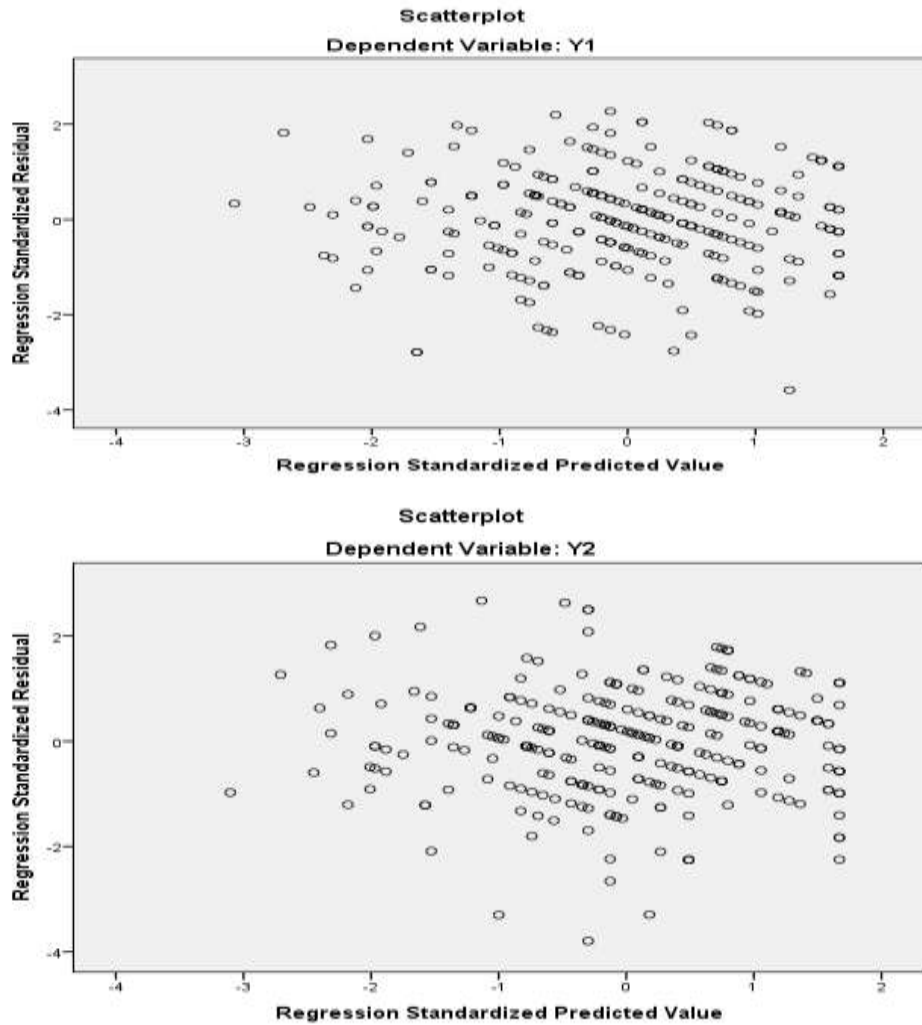
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

6. Uji Heteroskedastisitas



7. UJI DETERMINASI, UJI T DAN UJI F (DEPENDEN VARIABEL Y1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 ^a	,450	,447	2,17947

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1156,135	2	578,067	121,696	,000 ^b
	Residual	1410,782	297	4,750		
	Total	2566,917	299			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,661	1,270		2,882	,004
	X1	,134	,065	,103	2,066	,040
	X2	,622	,050	,614	12,355	,000

a. Dependent Variable: Y1

2. UJI DETERMINASI, UJI T DAN UJI F (DEPENDEN VARIABEL Y2)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y2

b. All requested variables entered.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	847,371	2	423,685	74,676	,000 ^b
	Residual	1685,066	297	5,674		
	Total	2532,437	299			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,782	1,388		4,166	,000
	X1	,146	,071	,112	2,050	,041
	X2	,517	,055	,514	9,406	,000

a. Dependent Variable: Y2

3. UJI DETERMINASI, UJI T DAN UJI F (DEPENDEN VARIABEL Y3)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,540 ^a	,291	,287	2,38242

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	693,372	2	346,686	61,080	,000 ^b
	Residual	1685,748	297	5,676		
	Total	2379,120	299			

a. Dependent Variable: Y3

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,757	1,388		4,868	,000
	X1	,145	,071	,115	2,047	,042
	X2	,461	,055	,473	8,380	,000

a. Dependent Variable: Y3